

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan

1. Pengertian dan Jenis-jenis Kelompok

K. Subrata, (2000, hlm. 9-15) menuturkan beberapa konsep kelompok, misalnya; Homans (1950), dan Bonner (1953) mendefinisikan kelompok adalah sejumlah orang-orang yang saling melakukan interaksi, dan proses interaksi inilah yang membedakan kelompok dengan sekedar kumpulan orang-orang. Lewin (1951), Fiedler (1967), Cartwright dan Zander, (1968), dan Wiriaatmadja, (1971) mengemukakan bahwa kelompok adalah kumpulan manusia, dua orang atau lebih, menunjukkan saling ketergantungan, dengan pola interaksi yang nyata. Cartwright dan Zander (1968) beranggapan bahwa, interaksi adalah satu bentuk aktual dari saling ketergantungan dan merupakan unsur utama terwujudnya kelompok. Sherif dan Sherif (1956) mengartikan kelompok sebagai suatu unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu dengan kedudukan tertentu, memiliki hubungan peranan antara satu dengan lainnya, dan seperangkat nilai-nilai atau norma yang mengatur perilaku anggotanya. McDavid dan Harari (1968) memandang kelompok sebagai pilihan, dan bertindak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, untuk berpartisipasi dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia selaku subyek.

Cattell, (1951), Bass, (1960), dan Reitz, (1977) mengartikan kelompok didekati dari dimensi motivasi : dikemukakan bahwa kelompok merupakan kumpulan manusia, terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berhubungan, dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masing-masing anggotanya. Pendapat yang memberikan tekanan pada unsur kesamaan, dikemukakan Gunardi (1976, hlm. 49), mengartikan “kelompok sebagai dua atau lebih individu, mempunyai beberapa

kesamaan objek perhatian, berinteraksi secara mantap, bersama-sama menyusun struktur dan bekerjasama dalam mencapai tujuan.”

Smith (1945), Bales (1950), maupun Thelen (1959) mengemukakan unsur persepsi, dan tindakan bersama untuk membedakan anggota dan bukan anggota kelompok. Hare, (1962) menunjukkan ciri-ciri yang membedakan kelompok dengan sekedar kumpulan orang-orang. Ciri-ciri tersebut adalah (1) anggota kelompok mengadakan interaksi satu sama lain dalam kelompok (2) mempunyai tujuan yang memberi arah gerak kelompok dan anggotanya untuk mencapainya, (3) membentuk norma-norma yang mengatur ikatan dan aktivitas anggota, (4) mengembangkan status dan peranan, serta (5) adanya jaringan ikatan perorangan dalam kelompok. Sedangkan Homans (1950) mengemukakan ciri-ciri kelompok kecil, yakni (1) interaksi, (2) sentimen, (3) aktivitas dan (4) kedudukan dalam sistem eksternalnya.

White dan Lippitt (Cartwright dan Zander, 1968, hlm. 86) menyarankan untuk mempelajari kehidupan kelompok, hendaknya diperhatikan hal-hal seperti ; (1) interaksi, (2) struktur, (3) kekompakkan, (4) aktivitas, dan (5) kepemimpinan.

Olmsted (1959), dan Cooley (Gerungan, 1972, hlm. 32) membedakan kelompok dilihat dari tingkat keeratannya, menjadi : (a) *Kelompok Primer* adalah kumpulan orang-orang yang saling kenal-mengenal satu sama lain, sering bertemu tatap muka, bergurau, akrab dalam waktu yang cukup lama, bekerjasama tanpa perantara dan berbagi perasaan, dan (b) *Kelompok Sekunder* adalah kumpulan orang-orang yang jarang bertemu tatap muka, berhubungan hanya sepiantas atau dengan perantara, dan kurang keakrabannya. Sedangkan Shaw (1979), maupun Mardikanto (1993, hlm. 59) membedakan : (a) *Kelompok Formal* dibentuk dengan mengikuti pedoman peraturan dan peundangan-undangan tertentu, serta memiliki struktur jelas yang menggambarkan kedudukan, dan peranan masing-masing individu yang menjadi anggotanya, dan pembentukan

kelompok tersebut sering dinyatakan dengan tegas secara tertulis, dan (b) *Kelompok Informal* dibentuk tanpa melalui ketentuan tertentu, struktur dan pembagian tugas pada anggota tidak pernah diatur secara jelas. Kelompok yang demikian biasanya terbentuk karena adanya pertemuan-pertemuan yang terjadi berulang kali, dan berdasar pengalaman yang sama, dan kepentingan yang sama pula (Soedijanto, 1998, hlm. 18). Lain halnya dengan Vinche et.al,(1973, hlm. 43), Krech et.al, (1962), Ruch et.al, (1975) dalam Margono Slamet (1998, hlm. 6) membedakan kelompok berdasarkan bentuk hubungan antar anggota dalam mencapai tujuan bersama, menjadi (a) *Kelompok interacting* merupakan kelompok yang dalam pencapaian tujuan menuntut adanya kerjasama antara para anggotanya atau adanya rasa saling memuaskan, (b) *Kelompok coacting* berbeda dengan kelompok *interacting* tujuan kelompok hanya dapat dicapai dengan baik, apabila masing-masing anggota melaksanakan tugas sesuai dengan peran yang telah ditetapkan dan menunjukkan prestasi sebaik-baiknya, masing-masing anggota tidak harus bekerjasama dengan anggota yang lain, dan (c) *Kelompok counteracting* berlawanan dengan kelompok *interacting*, untuk mencapai tujuan kelompok justru para anggotanya harus saling bersaing. Sedangkan Bertrand (1974) dan Miles (1959) dalam Margono Slamet (1989, hlm. 9) mendekati dari sisi tujuan bersama yang ingin dicapai, membedakan kepada; (a) *Kelompok Sosial*: Kelompok ini lebih menekankan pada pemenuhan fungsi-fungsi social, seperti mencapai kesenangan atau kesehatan rohani, dan (b) *Kelompok Tugas* : Kelompok tugas lebih menekankan pada penyelesaian tugas-tugas, dalam jangka waktu tertentu.

Jenis-jenis kelompok tersebut di atas, merupakan bentuk ideal, akan tetapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari hubungan masing-masing kelompok dalam setiap penggolongan tersebut merupakan suatu garis kontinum, sehingga akan ditemui jenis kelompok yang letaknya berada di antara keduanya. Pembedaan

kelompok ini mempunyai arti penting dalam hubungannya dengan pembinaan kelompok, sebab karakter dan caranya masing-masing berbeda.

2. Kelompok Tani

Mosher (1966, hlm. 25) mengemukakan bahwa salah satu syarat pelancar dalam pembangunan pertanian adalah hanya kerjasama kelompok petani. Menurut Abbas (1995) pengelompokan petani di Indonesia telah mulai sejak zaman penjajahan Belanda, di Jawa Barat dengan nama Rukun Tani dan di Jawa Timur dengan nama Kring Tani. Berbagai kelompok petani yang pernah dikembangkan di Indonesia antara lain pada tahun 1961 dibentuk “Organisasi Gerakan Swasembada Beras” (OGSB). Kemudian “Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)” dan “Kelompok Petani Demonstrasi Area.” Akhirnya sejak tahun 1976 dengan dilaksanakan “Proyek Penyuluhan Tanaman Pangan” dan dilaksanakannya sistem kerja “Latihan dan Kunjungan” (Laku) dalam penyuluhan pertanian, maka kerjasama antar petani pada satu wilayah hamparan yang sama kemudian dibakukan sebagai “Kelompok Tani Hamparan” (Herman Soewardi, 1980, hlm. 47).

Hadisaputro (1978, 23) membagi kelompok tani yang didasarkan pada wilayahnya, yakni (1) kelompok petani hamparan dan (2) kelompok petani domisili. Pada tahun 1979 di bentuk Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), dengan tujuan untuk menumbuhkan kemandirian dan memberdayakan masyarakat pra sejahtera dipedesaan agar mau dan mampu menjalankan fasilitas yang tersedia untuk mengembangkan usaha tani dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga (Deptan, 2003).

Prinsip pembentukan kelompok tersebut antara lain ; (1) prinsip partisipatif : proses penumbuhan kelompok partisipasi perlu dikembangkan sebagai bagian dari proses pembelajaran, (2) prinsip swadaya ; penumbuhan kelompok harus

didasarkan atas kemauan dan kemampuan mereka sendiri. Penyuluh hanya memotivasi dan membantunya, (3) prinsip keserasian ; tumbuhnya sebuah kelompok harus didasari kesamaan-kesamaan dalam kehidupan mereka, termasuk adanya saling kenal, saling mempercayai, mempunyai kepentingan yang sama yaitu perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan, 4) prinsip belajar menemukan sendiri (*discovery learning*); Kelompok tumbuh atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri yang mereka butuhkan dan akan mereka kembangkan.

Keberhasilan kelompok tani berintensifikasi pertanian diukur dengan sepuluh kemampuan berkelompok yang merupakan perwujudan dari perilaku dinamika kelompok (Adjid, 1985). Soebijati Soebroto (1989) dalam Margono Slamet (1998 hlm 2) mengemukakan bahwa kriteria kemampuan kelompok, meliputi (1) daya serap dan pemanfaatan informasi, (2) perencanaan kegiatan, (3) kerjasama, (4) pengadaan dan pengembangan sarana kerja, (5) kemampuan memupuk modal, (6) menaati perjanjian, (7) mengatasi hal-hal darurat, (8) mengembangkan kader, (9) hubungan kelompok dengan KUD, (10) tingkat produktivitas usaha taninya.

Berdasar tingkat kemampuan berintensifikasi tersebut, kelompok tani dibedakan menjadi empat strata, yakni: (1) kelompok tani pemula, (2) kelompok tani lanjut, (3) kelompok tani madya, dan (4) kelompok tani utama. Kemudian pada era reformasi upaya fasilitasi dan pemberdayaan petani digunakan pendekatan manajemen dan organisasi, sehingga dari beberapa kelompok tani dalam satu wilayah kerja digabungkan menjadi satu organisasi kelompok tani yang dikenalkan sebutan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

3. Pengertian dan Unsur-unsur Dinamika Kelompok

Konsep dinamika kelompok sering digunakan dalam makna yang berbeda. Para ahli ilmu sosial, dinamika kelompok diartikan sebagai bidang studi yang mempelajari gerak atau kekuatan dalam kelompok, yang menentukan perilaku

kelompok dan anggotanya. Para praktisi, dinamika kelompok digunakan untuk menunjuk pada kualitas suatu kelompok dalam mencapai tujuannya, jadi cenderung ditujukan untuk mengukur tingkat keefektifan kelompok dalam mencapai tujuan (Margono Slamet, 1989, hlm. 56).

Dinamika kelompok dipandang sebagai cara pendekatan yang efektif, dalam upaya pemberdayaan petani ke arah kemandirian berusaha tani. Setiap kelompok pada dasarnya mempunyai dinamika, yang berbeda pada derajat/tingkatannya, yang satu dapat lebih tinggi tingkat gerak atau kekuatannya dari pada kelompok yang lain, atau sebaliknya. Menurut Beal *et.al.* (1962, hlm. 98), dan Cartwright dan Zander (1968, 107), dinamika kelompok sebagai pengetahuan yang mengkaji kehidupan kelompok, yakni menganalisis cara-cara mengorganisir, mengelola, serta pengambilan keputusan dalam kelompok. Berkaitan dengan hal itu Homans (1950, hlm. 67) mengartikan dinamika kelompok dengan menekankan pada analisis hubungan-hubungan anggota dalam kelompok, berdasar prinsip bahwa perilaku kelompok merupakan hasil interaksi dinamis di antara para anggota.

Bradford *et.al.* (1964, hlm. 167) hasil penelitiannya membuktikan bahwa melalui dinamika kelompok seseorang akan dapat dirubah atau berubah konsepsi dan perilakunya, karena adanya interaksi diantara sesama anggotanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Jenkins (1961, 95) mengemukakan bahwa dinamika kelompok merupakan kekuatan atau gerak yang terdapat di dalam kelompok, yang menentukan atau berpengaruh terhadap perilaku kelompok dan perilaku para anggotanya dalam mencapai tujuan bersama. Dalam proses interaksi tersebut juga kekuatan atau gerak yang ada dalam kelompok dipengaruhi oleh berbagai peranan yang dilaksanakan atau dimainkan oleh mereka yang menempati posisi tertentu dalam struktur kelompok yakni pengurus maupun para anggotanya.

Peranan adalah tindakan atau perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu struktur kelompok (Margono Slamet,

1985, hlm. 45). Pendapat tersebut sejalan dengan Katz dan Kahn (1966, hlm. 55), yang menggambarkan peranan dan kedudukan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama, namun merupakan dua konsepsi berbeda yang tidak terpisah. Pareek (1985, hlm. 49) mengemukakan bahwa posisi atau kedudukan pada dasarnya merupakan konsepsi kewajiban yang berakitan dengan posisi atau kedudukan, dan sejumlah perilaku yang diharapkan dari suatu peranan disebut fungsi.

Berdasarkan pada konsep-konsep tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa kelompok akan menjadi dinamis apabila mereka yang menempati posisi dengan peranan tertentu dalam suatu struktur kelompok melaksanakan berbagai fungsinya dalam pencapaian tujuan. Berbagai fungsi yang perlu dilaksanakan oleh mereka yang menduduki suatu posisi dengan peranan tertentu dalam struktur kelompok tersebut, merupakan unsur-unsur yang menjadikan suatu kelompok hidup, dan menjadi dinamis dan efektif.

Di lihat dari dimensi psikologi sosial, menilai dinamika kelompok berarti menilai kekuatan atau gerak yang terdapat di dalam suatu kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan anggotanya dalam pencapaian tujuan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud menurut Beal *et al.* (1962), Cartwright dan Zander (1968), dalam Margono Slamet (1998, hlm. 3-4), dan K. Subrata (2000, hlm. 5-7) berasal dari unsur-unsur dinamika kelompok yaitu ; (1) Tujuan Kelompok, (2) Peranan Fungsional Anggota Kelompok, (3) suasana kelompok, (4) kekompakan kelompok, (5) pembinaan kelompok, (6) tekanan pada kelompok, dan (7) keefektifan kelompok.

(1) Tujuan Kelompok : Cartwright dan Zander (1968, 108) mengemukakan bahwa tujuan kelompok merupakan hasil yang ingin dicapai oleh kelompok. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hays dan Bush (1954), dan Barker *et al.* (1987) mengatakan bahwa tujuan kelompok adalah hasil akhir yang ingin dicapai kelompok dan merupakan unsur-unsur yang mendorong seseorang memasuki kelompok. Menurut Margono Slamet (1989, hlm. 45), tujuan kelompok

bukan hanya mempunyai fungsi sebagai sumber utama yang membangkitkan motivasi, tetapi juga merupakan petunjuk bagi para anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Berkaitan dengan hal tersebut, Cartwright dan Zander (1968, 110) menekankan bahwa kejelasan tujuan kelompok akan sangat berpengaruh pada aktivitas anggota dalam mencapai tujuan kelompok. Demikian juga Margono Slamet (1989, hlm. 47) mengemukakan bahwa kejelasan dan formalnya tujuan kelompok akan mempengaruhi kedinamisan kelompok, sebab tujuan yang tidak jelas dan tidak formal akan menyebabkan keaburan bagi anggota, dan tidak memotivasi anggota untuk bertindak. Anggota kelompok tidak tahu arah dan kegiatan kelompok dan hal-hal yang harus dilakukan, sehingga tujuan sebagai salah satu unsur dinamika kelompok menjadi lemah.

- (2) Peranan fungsional anggota kelompok : Untuk menggerakkan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan kelompok diperlukan adanya struktur. Gerungan (1972) menyatakan bahwa peranan fungsional anggota kelompok merupakan susunan hierarkis mengenai hubungan-hubungan, berdasarkan peranan dan status antara masing-masing anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Cartwright dan Zander (1968, 110) menyatakan bahwa peranan fungsional anggota kelompok adalah bentuk hubungan antara individu di dalam kelompok, yang disesuaikan dengan posisi dan peranan masing-masing individu.

Margono Slamet (1989, hlm. 37) mengemukakan bahwa peranan fungsional anggota kelompok adalah cara bagaimana kelompok mengatur dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa banyak hal yang menentukan bentuk peranan fungsional anggota kelompok, tetapi yang utama adalah menyangkut : (a) fungsi kekuasaan atau pengambilan keputusan, (b) fungsi tugas/pembagian pekerjaan, (c) fungsi komunikasi yaitu

bentuk dari jaringan komunikasi yang terjadi dalam kelompok, dan (d) wahana untuk terjadinya interaksi.

- (3) Suasana Kelompok : Beal *et.al.* (1962) mengemukakan suasana kelompok adalah suasana dalam lingkungan kelompok bersifat fisik maupun mental yang mempengaruhi perasaan senang atau tidak senang pada anggota kelompok. Sejalan dengan pendapat Margono Slamet (1989, hlm. 49) mengungkapkan bahwa suasana kelompok pada dasarnya merupakan keadaan moral, sikap dan perasaan-perasaan yang terdapat di dalam kelompok. Sebagai indikatornya dapat dilihat pada sikap anggota seperti bersemangat atau sebaliknya apatis terhadap kegiatan dan kehidupan kelompok. Kelompok menjadi semakin dinamis jika anggota kelompok menunjukkan semakin bersemangat dalam kegiatan kehidupan berkelompok. Suasana kelompok itu dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya adalah hubungan antara para anggota kelompok, kebebasan berpartisipasi, dan lingkungan fisik.
- (4) Kekompakan Kelompok : Menurut Schachter (Cartwright dan Zander, 1968, 111) kekompakan kelompok akan mempengaruhi moral kelompok (*group morale*), perasaan kesetiakawanan, keterlibatan dalam berbagai kegiatan, dan semangat untuk mencapai produktivitas kelompok. Margono Slamet (1978, hlm. 39) mengatakan bahwa kekompakan kelompok adalah perasaan keterkaitan anggota terhadap kelompok atau rasa memiliki kelompok. Selanjutnya ditunjukkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kekompakan kelompok, yakni :
- (a) ada tidaknya rasa kebersamaan dan saling memiliki antara pemimpin dan para anggota kelompok,
 - (b) pandangan anggota terhadap nilai-nilai yang melekat pada tujuan yang ingin dicapai,
 - (c) homogenitas dalam berpartisipasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok, dan
 - (d) jiwa serta semangat kerjasama yang tinggi di antara anggota.
- Schachter (Cartwright dan Zander, 1968) beranggapan bahwa faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok adalah pada daya tarik kelompok.

- (5) Pembinaan Kelompok : Milles (1959) dan Beal *et.al.*, (1962) mengartikan pembinaan kelompok sebagai upaya untuk tetap memelihara dan mengembangkan kelompok, yakni berusaha memelihara tata kerja kelompok, mengatur, memperkuat dan mengekalkan kehidupan kelompok. Margono Slamet (1989, hlm. 44) menawarkan kriteria kinerja kelompok yang dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan pembinaan dalam melestarikan kehidupan kelompok, yakni (a) kelompok selalu meningkatkan partisipasi anggota, (b) semua anggota merasa menjadi bagian dari kelompok, (c) kelompok selalu mengusahakan adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan anggota serta menyediakan fasilitas yang diperlukan, (d) melakukan koordinasi, pengawasan, dan kelancaran komunikasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas, dan (e) mendapatkan anggota baru, membinanya agar menjadi anggota yang baik.
- (6) Tekanan Kelompok : Margono Slamet (1978, hlm. 46) meyakini bahwa tekanan itu perlu untuk menumbuhkan kedinamisan, tetapi tekanan yang terlalu kuat juga dapat mematikan kedinamisan. Tekanan yang dapat meningkatkan atau melemahkan motivasi dapat berasal baik dari dalam kelompok sendiri maupun dari luar. Cartwright dan Zander (1968) menyatakan bahwa kelompok dapat memberikan tekanan kepada para anggotanya melalui nilai-nilai tertentu yang mengikat perilaku anggota dalam kehidupan berkelompok.
- (7) Keefektifan Kelompok : Schachter *et.al.* (1951) menggunakan istilah produktivitas kelompok, yang maknanya disamakan dengan konsep efektivitas kelompok. Mereka mengartikan secara khusus bahwa produktivitas kelompok sebagai keluaran kelompok perkesatuan waktu. Secara umum produktivitas kelompok diartikan sebagai (1) mutu hasil kelompok, (2) kecepatan dan efisiensi dari gerak kelompok dalam mencapai tujuan, dan (3) tingkat realisasi potensi kelompok. Lewin *et.al.*, (1939) kriteria keefektifan kelompok, yakni : (1) efisiensi biaya, (2) menggerakkan kelompok, (3) menekan kemungkinan

terjadinya kesalahan, (4) memberikan ganjaran dan kepuasan kepada anggota, (5) menjaga kelestarian kehidupan kelompok, dan (6) meningkatkan mutu hubungan interpersonal. Margono Slamet (1978, hlm. 46) menyatakan bahwa efektivitas kelompok mempunyai pengaruh timbal-balik terhadap dinamika kelompok.

4. Fungsi Kepemimpinan

Margono Slamet (1989, hlm. 50) mengemukakan bahwa pertumbuhan dinamika kelompok akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dari kelompok tersebut, terutama pengaruh pimpinan formal dan informal cukup besar dalam memberikan pengakuan terhadap kelompok dan kepemimpinan kelompok.

Mempelajari kepemimpinan dari segi psikologis sosial, terdapat dua pendekatan yang mendasarkan pada : (a) fungsi pemimpin, dan (b) karakteristik individual (Cartwright dan Zanders, 1968 ; Hare, 1976; Jones, 1980). Pendekatan pertama, berasumsi bahwa keberhasilan seorang pemimpin akan muncul dalam konteks sosial tertentu. Kemampuan menyeimbangkan atau menyelaraskan potensi yang ada dalam kelompok, menentukan keberhasilan seorang pemimpin (Marat,1996, hlm. 15). Suatu peranan mungkin diperlukan pada situasi tertentu, dan peranan lain mungkin diharapkan dalam situasi yang berbeda.

Kemampuan seseorang melaksanakan fungsi tertentu dengan tepat, tidak konvensional, memodifikasikan sistem sosialnya pada konteks perubahan sosial yang dihadapi cenderung menjamin keberhasilan seseorang dalam memerankan kepemimpinan. Berdasar uraian tersebut di atas, fungsi kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi : (a) fungsi tanggap terhadap inovasi, (b) fungsi pembinaan, dan (c) fungsi mengarahkan.

Pendekatan kedua, berasumsi bahwa keberhasilan seorang pemimpin berhubungan erat dengan karakteristik tertentu yang dimilikinya, seperti intelegensi, kestabilan emosi, percaya diri dan sifat lainnya. Kepemimpinan

kadangkala diartikan sebagai fungsi yang harus dilaksanakan dalam organisasi atau kelompok, sebab kepemimpinan itulah yang setiap kali mengambil keputusan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh organisasi atau kelompok (Fiedler, 1967). Margono Slamet (1989, hlm. 55) mengartikan kepemimpinan sebagai pengambilan prakarsa bertindak yang menghasilkan suatu pola interaksi yang mantap dalam rangka memecahkan masalah bersama atau mencapai tujuan-tujuan bersama. Terry (1960) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, bekerja keras dengan penuh kemauan untuk mencapai tujuan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hersey dan Blanchard (1977) menekankan bahwa kepemimpinan terjadi bila dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan atau kelompok. Berbeda dengan pendapat tersebut, Cartwright dan Zander (1968) mengartikan kepemimpinan sebagai kegiatan yang membantu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Lippitt dan White (1969) berkesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang mewarnai kinerja kelompok, sedangkan Likert (1953) mengungkapkan adanya hubungan yang erat antara kepemimpinan, dan efektivitas kelompok.

Menurut kaum dinamika kelompok (K. Subrata, 2000, hlm. 31), agar interaksi dapat berlangsung maka seorang pemimpin hendaknya memiliki karakteristik ; (a) persepsi sosial (*social perception*) yang luas, (b) kemampuan berfikir abstrak (*ability in abstract thinking*), dan (c) kestabilan perasaan (*emotional stability*). Selanjutnya Margono Slamet (1989, hlm. 57) menawarkan kriteria karakteristik yang harus dimiliki setiap pemimpin, yaitu : (1) memiliki empati, (2) menjadikan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya, (3) penuh pertimbangan pada orang lain, (4) lincah dan penggembira, dan (5) memiliki kestabilan emosi.

Yusuf (1988, hlm. 53) memberikan kriteria kepemimpinan kelompok yang efektif, yakni bila pemimpin menunjukkan kemampuan untuk : (a) Membuat orang lain menjadi kuat, dalam arti mampu mempengaruhi, dan menentukan masa

depannya, (b) Menumbuhkan kepercayaan anggota pada diri pemimpin, (c) Membantu, memupuk, dan menumbuhkan hubungan kerjasama antar sesama anggota kelompok dan pihak lain, (d) Memecahkan konflik yang timbul dalam kelompok, (e) Mendorong berkembangnya perilaku dan cara berfikir yang berpedoman dan mengarah pada pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama.

Margono Slamet (1989, hlm. 59) menunjukkan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan setiap pemimpin, yakni (a) menganalisis organisasi dan tujuannya, (b) menentukan struktur dan mekanisme kerja, (c) mengambil prakarsa, (d) pencapaian tujuan, (e) menyediakan fasilitas untuk komunikasi, (f) menumbuhkan rasa kesatuan, (g) menumbuhkan rasa kebahagiaan, dan (h) menciptakan kekompakan dalam kejiwaan dan tindakan. Selanjutnya David Krech dan R.Cruchfield menuturkan fungsi yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin dalam kelompok yaitu sebagai; (1) pelaksana, (2) perencana, (3) pembuat kebijakan, (4) sebagai ahli, (5) wakil kelompok keluar, (6) pengawas hubungan dalam kelompok, (7) pemberi hadiah atau hukuman, (8) wasit dan perantara, (9) sebagai contoh atau tauladan, (10) lambang kelompok, (11) penanggungjawab, (12) pemuka ideologi, (13) tokoh bapak, dan (14) sebagai kambing hitam (*scape goat*) K.K. Subrata, 2000, hlm. 100-102)

B. Pendekatan Pembangunan Pedesaan dan Pertanian

1. Konsep Pembangunan

Transformasi sosial ekonomi mengantarkan sebuah entitas kepada perubahan sosial dari satu tataran ke tataran kemajuan yang lain, proses tersebut dapat dilakukan melalui : (1) cara revolusioner, yang cenderung tidak bersahabat dan menghasilkan banyak akibat ikutan yang seringkali tidak diinginkan, dan (2) cara yang lebih evolusioner melalui pentahapan yang memakan waktu lebih panjang. Perubahan sosial evolusioner bisa berlangsung secara alamiah maupun dirancang (*by design*) dengan sengaja sesuai keinginan dan harapan masyarakat. Perubahan

spesial “evolusioner terencana” biasanya menjadi pilihan strategi transformasi sosial yang dipakai dalam mengubah keadaan sosial-ekonomi masyarakat secara damai (*non-violent social transformation*).

Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, konsep pembangunan menjadi salah satu pendekatan perubahan sosial terencana yang paling luas dan terpenting digunakan oleh banyak pihak. Pembangunan tidak saja berkonotasi damai namun juga terkandung gagasan “perubahan nasib” terhadap suatu keadaan. Hal ini terutama berkaitan dengan usaha terus-menerus yang dilakukan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemunduran sosial-kultural, sebagaimana yang dilabelkan oleh negara maju sebagai tradisionalisme. Dengan konstruksi-pemaknaan tersebut, maka pembangunan dipahami sebagai proses (dinamik) transformasi sosial-ekonomi-kultural yang secara sengaja dan terencana dijalankan untuk mengubah status kemajuan pada sebuah entitas sosial (pedesaan). Perubahan tersebut diperlukan bagi masyarakat agar dapat beranjak dari status ketertinggalan ke status perkembangan berikutnya yang dinilai lebih mapan dan modern. Oleh sebab itu derajat kemajuan suatu masyarakat mengambil standar atau ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif sebagaimana yang dikenal di negara-negara maju, maka sebagai sebuah *social-cultural change* proses pembangunan seringkali dipersamakan maknanya dengan proses modernisasi ala *westerenisasi*. Modernisasi ala *westerinisasi* (*western developmentalism*) artinya, proses pembangunan yang mengambil bentuk atau pola serta normatif dan orientasi nilai budaya barat sebagai parameter kemajuan tunggal (Peet and Hartwick, 1999, hlm. 26). Proses pembangunan seperti ini, ditengarai membawa konsekwensi yang sangat luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dinegara yang sedang berkembang. Konsekwensi tersebut timbul, karena pembangunan semata-mata mengambil pola replikasi dan imitasi secara totalitas atas gaya hidup, tata-kelembagaan sosial dan ekonomi, tata-pemerintahan, sistem ketata-negeraan,

dan hukum, serta mekanisme-mekanisme produksi-distribusi ekonomi tanpa disertai pertimbangan akan kesesuaian pada setting sosial-budaya lokal.

Kritik terhadap konsep pembangunan modernisasi-westernisasi selama ini, seringkali ditujukan pada ketidak-puasan atas kinerja konsep tersebut dalam memfasilitasi proses transformasi di negara-negara sedang berkembang. *Fenomena cultural-scock* yang ditanggung oleh masyarakat lokal sebagai akibat introduksi nilai-nilai barat, adalah gambaran jamak yang seringkali menjadi pokok gugatan pendekatan ala barat dalam pembangunan. Kejutan budaya itu berlangsung di tiga ranah, yaitu : (1) pola pikiran atau gagasan, (2) pola tindakan atau perilaku, dan (3) pola sarana pada ranah *social supporting system* (teknologi, kelembagaan, hukum, sistem ekonomi, politik dan sebagainya).

Dalam bidang sosial-ekonomi, konsep pembangunan ala barat mendapatkan kritik dari kalangan yang tidak puas, ketidakpuasan tersebut berakar pada beberapa fakta; Pertama, pembangunan berpolakan modernisasi alat barat ternyata telah meminggirkan posisi ekonomi masyarakat lokal (Seligson and Passe-Smith, 2003), Kedua, modernisasi ala barat menapikan eksistensi sistem sosio-budaya masyarakat lokal, sehingga bukan kemajuan yang dihasilkan dari proses modernisasi tersebut melainkan kemandegan. Dalam hal ini para ahli menyebutnya sebagai *modernization without development* (Sayogyo, 1973, hlm. 56). Ketiga, modernisasi ala barat sangat menguntungkan pertumbuhan dan ekspansi modal serta proses akumulasi kapital bagi perekonomian barat serta global (Frank, 1978, Wallerstein, 1976, Wallerstein, 2005). Keempat, modernisasi ala barat justru mendorong proses-proses disintegrasi sosial-masyarakat di kawasan sedang berkembang, dimana semangat keloktivitas (seperti : gotong-royong) sebagai ciri sosiologis penting meluntur secara dramatis (Galtung, 1995, hlm. 68)

Dengan berbagai pandangan kritis semacam itu. Pertanyaannya, masihkah konsep pembangunan modernisasi-westerinisasi cocok digunakan dalam proses transformasi sosial-ekonomi dan sosial-budaya di Indonesia? tidak adakah tawaran

lain selain mazhab modernisme bagi proses transformasi sosial-budaya masyarakat dikawasan sedang berkembang? Jika modernisasi ternyata tetap sebagai satu-satunya pilihan, maka bagianmanakah penyesuaian-penyesuaian perlu dilakukan? Bagi sektor pertanian-pedesaan, adakah konsep pembangunan ala modernisasi yang lebih operasional, lebih cocok, serta tidak menimbulkan gegar budaya yang berlebihan bagi masyarakat lokal?

2. Pembangunan Aliran Kritis

Konsep pembangunan beraliran modernisme mendapatkan kritik yang sangat pedas sebagai akibat kegagalannya dalam membawa perubahan sosial secara memuaskan bagi semua pihak. Kritik paling keras datang dari para penganut populisme, yang pada intinya mengatakan bahwa pembangunan telah berlangsung tanpa pemihakan terhadap masyarakat kecil. platform pertumbuhan (*growth*) dan model pembangunan kapitalistik yang dibawa serta oleh modernisasi, justru menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi masyarakat lapisan bawah.

Secara garis besar, paling tidak ada tiga kubu yang mempertanyakan efektivitas konsep pembangunan ala modernisasi dalam memfasilitasi proses transformasi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat di negara sedang berkembang. Ketiga kubu tersebut adalah : (1) kubu penganut teori ketergantungan, (2) kubu penganut teori sistem dunia, dan (3) kubu penganut teori pembardayaan, yang berusaha memandirikan masyarakat, tanpa harus bergantung pada sistem eksternal.

Kubu pertama (teori ketergantungan) beranggapan bahwasanya modernisasi adalah “strategi licik” negara maju untuk membuat negara-negara sedang berkembang tergantung secara ekonomi kepada mereka. Modernisasi melalui investasi asing pada awalnya disambut baik dan dianggap sebagai motor perluasan kesempatan kerja, namun dalam bagi produk-produk dari investasi asing tersebut. Dalam jangka panjang, investasi asing ternyata mensubstitusi dan meminggirkan

semua modal produksi asli-lokal, karena secara teknologi dan manajemen mereka memang kalah bersaing, investasi juga telah mengakibatkan terbentuknya struktur sosial pekerja (buruh) di negara pheri-pheri dimana investasi di tanam, pada tahap berikutnya negara-negara tujuan investasi asing tersebut hanyalah berisi kelas pekerja yang menjadi pasar bagi produk-produk dari investasi asing tersebut. Mereka adalah sumber pendapatan yang sangat substansial bagi negara maju. Pada titik inilah berlangsung proses “*economic leakage*” (pembocoran sumberdaya ekonomi) dari negara-negara periferial ke negara maju (pemilik dana investasi). Kebocoran itu tidak dapat dibendung, oleh karena semua sendi perekonomian di negara-negara periferial telah sepenuhnya berada dalam kontrol konglomerasi korporat internasional (Trans-National Corporation/TNCs). Kenyataan inilah yang dianggap sebagai sindroma ketergantungan struktural yang terjadi akibat pembangunan mengambil jalan modernisasi via pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan pada investasi asing. Isu utama teori pembangunan ketergantungan adalah pada “rasa ketidakadilan” yang dialami negara periferial yang perekonomiannya tereksploitasi oleh negara maju. Solusi politik proteksionisme dan nasionalisasi kepemilikan saham korporasi TNCs dipandang sebagai pendekatan utama untuk menetralsir derajat ketergantungan yang telah diciptakan oleh negara maju dikawasan periferial.

Kubu kedua (teori sistem dunia), menggunakan teori ketergantungan sebagai basis teori utamanya, Teori sistem dunia dianggap sebagai kelanjutan dari teori ketergantungan, dimana Wallestein (1976) sebagai penggagasnya menggunakan analogi imperialisme untuk menerangkan proses dan akibat dari ekspansi TNCs ke segala penjuru dunia. Sistem produksi-distribusi serta konsumsi lokal digantikan oleh sistem global sehingga menjadi seram dan mendunia. Anggapan akan kegagalan modernisasi ala investasi barat di negara sedang berkembang bermula dari titik ini, dimana proses-proses integrasi sistem ekonomi lokal terhadap moda produksi kapitalisme global telah membentuk struktur *world-economy* dan

hegemoni kapital. Struktur hegemonik terhadap perekonomian lokal tersebut dianggap sebagai struktur yang tidak adil dan tidak demokratis, karena men-*displace* perekonomian lokal. Bagian-bagian terkecil perekonomian di setiap kawasan dunia lenyap kerana tidak dapat bertahan hidup kecuali mereka meleburkan diri ke dalam “jebakan sistem ekonomi kapitalisme dunia”. Demikianlah sejarah peradaban perekonomian saat ini sangat kuat ditandai oleh gambaran *world capitalist imperium* sebagai hasil ekspansi TNCs ke seluruh penjuru dunia. Struktur hegemoni perekonomian global dan korporasi barat, mengakibatkan polarisasi penguasaan perekonomian pada segelintir korporasi global (misalnya: Coca-cola, McDonald, Generalelectric, Bayer, Toyota, Nestle, Nokia,dll). Di kutub yang lain negara-negara sedang berkembang menjadi kumpulan entitas yang tidak berdaya dihantam oleh kapitalisme global. Dalam hal ini. *Redistribusi* ekonomi dari negara maju ke negara sedang berkembang dipandang sebagai satu-satunya solusi keadilan.

Konsep pembangunan *modernisasi–westernisasi* tidak dapat dielakan, juga terjadi dan berlangsung sangat ekspansif di Indonesia. Pertanyaanya adakah model pembangunan alternatif yang dapat membebaskan entitas-entitas sosial lokal dari segala ketergantungan? Dapatkah model tersebut dioperasionalkan?

Dari pertanyaan tersebut, muncul kubu ketiga dalam teori pembangunan kontemporer (teori pemberdayaan) yang menentang modernisasi ala westernisasi ala kapitalisme, secara teoritik, basis ideologi pemberdayaan adalah Neo-Marxisme. Karena menggunakan asumsi pembebasan dari ketertindasan. Beberapa asumsi kerja yang mendasari teori pemberdayaan tersebut. Fakta pertama adalah keterbelakangan atau keterpinggiran (diukur oleh derajat pendidikan, kesehatan, status pangan, status pendapatan, pemenuhan papan dan akses terhadap informasi, hingga kepada akses pada aktivitas politik) sebagai akibat kapitalisme global. Fakta kedua adalah ketertinggalan (diukur dari angka pencapaian sasaran indikator-kemajuan yang dibandingkan secara relatif antara satu kelompok dengan

kelompok lainnya), Fakta ketiga adalah kemiskinan (diukur melalui angka pendapatan atau pengeluaran perkapita ataupun oleh pemenuhan kebutuhan fisik minimum seperti ; pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, serta martabat

individu sebagai manusia). Fakta keempat adalah ketergantungan (diukur oleh derajat kebebasannya dalam menentukan nasib sendiri). Semua fakta tersebut bermuara ke satu persoalan yaitu sindroma ketidakberdayaan dan ketidakmandirian.

Benarkah konsep pembangunan berideologikan *empowerment* mampu menjadi solusi atas segala persoalan di atas? Bagaimana konsep tersebut diimplmentasikan di lapangan?.

3. Pembangunan Pedesaan dan Pertanian di Indonesia

Fase Pertama : Ideologi Modernisme Tumbuh dan Menguat.

Strategi pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia mengalami perubahan pendekatan yang sangat menarik, secara sederhana bisa dipetakan ke dalam tiga fase yang unik. Pada fase 25 tahun pertama sejak kemerdekaan pembangunan pedesaan lebih banyak menempuh pendekatan pemenuhan *basic-needs approach*. Ditengah-tengah hiruk pikuknya politik dimasa itu pendekatan pembangunan ini tampil melalui berbagai program yang sangat memikat seperti ; pemberantasan buta huruf, peningkatan pelayanan air bersih, penekanan angka kematian ibu melahirkan, memperpanjang usia harapan hidup, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan yang sejenisnya.

Pada kurun waktu itu, pembangunan pangan dan pertanian pedesaan ditandai juga oleh intruduksi teknologi produksi pertanian yang kemudian dikenal sebagai bagian dari revolusi hijau (pengenalan varietas unggul, pupuk buatan, mekanisasi

pertanian, irigasi teknis, dan intensifikasi pertanian masal). Pembangunan pedesaan pada kurun waktu itu, mampu mengangkat harkat-martabat penduduk desa meski juga memberikan dampak kurang baik pada tata-perilaku dan kehidupan pedesaan secara signifikan. Kemajuan-kemajuan dipedesaan saat itu, diukur secara fisik oleh indikator ketersediaan pangan perkapita, energi perkapita, air bersih perkapita, panjang jalan perkapita, angka putus sekolah, angka kematian bayi, dan sebagainya. Pada fase pertama itu, modernisasi pedesaan menjadi jargon politik pembangunan yang penting dalam bingkai ideologi *developmentalism-modrnisisme* yang telah dicanangkan sebagai satu-satunya ideologi penting untuk melakukan perubahan sosial di Indonesia. Pada 25 tahun pertama ini, pendapatan perkapita naik dari sekitar \$100 tahun 1950-1960an menjadi sekitar US\$ 400 pada dekade 1970an, meski demikian, angka kemiskinan tetap tinggi meski prosentasinya tetap menurun. Secara sosiologis, dampak negatif revolusi hijau sesungguhnya sangat signifikan, namun prestasi capaian produksi pangan seolah menghapuskan semua persoalan ikutan tersebut di atas.

Fase Kedua : Ideologi Modernisme dan Industrialisme

Sementara desa terus mengalami perubahan struktural yang luar biasa, pada fase 25 tahun kedua (1970-1995), diperkenalkan pendekatan baru dalam ranah sederhana disebut sebagai transformasi pedesaan. Strategi yang ditempuh adalah “pembangunan manusia seutuhnya” bersama-sama dengan upaya industrialisasi berbasis pertanian. Strategi industrialisasi yang diambil menunjukkan bahwa perubahan sosial ekonomi tetap berjalan dalam ranah *developmentalism-modernism*. Sementara itu, dengan TNCs yang ikut ambil bagian dalam proses transformasi ekonomi-pedesaan, kehadiran ideologi kapitalisme-korporatisme tidak dapat dielakan masuk ke relung-relung pedesaan. Beberapa ciri penting pendekatan ini, antara lain : padat modal, otomatisasi-mekanisasi, ketergantungan pada modal asing, industri substitusi import, dan mass-production. Pada fase kedua ini, perekonomian desa tak terelakan masuk pada jebakan sistem ekonomi

kapitalisme dunia, agar desa terus mampu mengikuti perubahan pada aras makro, maka struktur-struktur perekonomian desa yang sebelumnya berjalan dalam moda-produksi tradisonalisme (*peasantry-colectivism*), kini harus dirombak menjadi lebih *adapted to the capitalist mode of production*. Pada fase ini ditandai dengan oleh infrastruktur-infrastruktur kelembagaan baru yang berciri lebih kapitalistik. Strategi industrialisasi dan industri komersialisasi pertanian berbasiskan investasi padat kapital (perkebunan skala besar dan industri pengolah pangan), pengembangan moda campuran (*hybrid-institution*) seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan “Bapak Angkat”, sistem kontrak, adalah akibat masuknya sistem produksi ekonomi kapitalistik ke pedesaan Indonesia.

Sepanjang fase ini, perubahan struktural dan pergeseran norma-norma yang dianut oleh masyarakat pedesaan berjalan dengan kecepatan yang sangat luar biasa dan radikal. Persinggungan desa dengan berbagai organisasi sosial asing, telah membuat masyarakat desa menjadi semakin kosmopolit, komersialistik, individualistik, dan *opportunistik* dibandingkan sebelumnya. Kelembagaan dan pranata sosial tradisi di masyarakat juga mengalami dekonstruksi dan reduksi peran secara signifikan. Kelembaan gotong royong, patron-klien, aksi kolektif, dan berbagai jenis tata-atura tradisi dipaksa untuk merging atau menyesuaikan diri dengan sisitem norma kapitalistik. Proses persinggungan tersebut, menyebabkan proses-proses pertukaran di pedesaaan sejak saat itu menjadi banyak berjalan di atas moda-transaksi komersial (jual-beli, hubungan kontrak, ekspor-import, dan sebagainya) dari pada transaksi berdasarkan ikatan tradisional berbasis *trust*.

Pada fase ini kekecewaan terhadap sistem pembangunan pedesaan sudah banyak berlangsung, karena desa mengalami persoalan ketergantungan serta eksploitasi sumberdaya alam yang sangat menyakitkan. Prestasi pembangunan pertanian yang bisa dibanggakan pada awal tahun 1970-1995an adalah tercapainya *food self-sufficiency* di awal dekade 80an. Sementara angka kemiskinan ditekan ke level 10 proses dengan pendapatan perkapita mencapai US

\$ 1.100 (tahun 1995) yang mengantarkan Indonesia masuk pada jaringan negara-industri kapitalis dunia sehingga dimasukkan dalam *second layer of Newly Industrialized Countries* (NIC). Saat itu, pedesaan telah menjadi bagian integral sistem perekonomian global. Dalam konstelasi hubungan sosial-produksi yang demikian, desa menjadi sapi perahan, dan mengalir ke pusat-pusat perdagangan internasional dunia. Akibatnya desa mengalami proses pemiskinan dan kerusakan sumberdaya alam lingkungan yang berarti misalnya penggundulan hutan, ekspor komoditas pertanian dan lain sebagainya.

Fase Ketiga: Penguatan Ideologi Demokratisme dan Populisme

Nasib perjalanan pembangunan pedesaan, sedikit berubah arah pada fase ketiga atau terakhir (sejak tahun 1996). Pada fase ketiga, pembangunan pedesaan menemukan format yang sama sekali berbeda dari dua fase sebelumnya. Pada fase terakhir ini, pembangunan pertanian- pedesaan lebih banyak menitik-beratkan pada pemenuhan kebutuhan politik warganya.

Terdapat dua kekuatan yang dapat dipandang bertanggung jawab atas perubahan tersebut, yaitu : (1) secara eksternal, terjadi penguatan ideologi populisme-demokratisme yang menuntut ruang kekuasaan makin leluasa bagi *civil-society* secara signifikan telah mendorong masyarakat desa untuk tampil berani memperjuangkan hak-haknya. Misalnya ; Penguatan kekuatan perlawanan sipil Eropa yang mampu meruntuhkan tembok-Berlin, sebagai lambang kekuasaan otoriter di awal dekade 90an di Eropa Barat dan terus merayap ke kawasan lain dunia, (2) secara internal kekuasaan otoritarian-sentralisme yang bekerjasama dengan kekuatan ekonomi kapitalisme-korporatisme TNCs makin membuat sesak napas masyarakat, sehingga memicu gerakan resistensi dari akar rumput yang makin menguat.

Krisis ekonomi nasional (yang dikenal sebagai “krisis moneter” tahun 1997), telah mempercepat proses perubahan sosial di Indonesia. Ketidak-percayaan

terhadap rezim pemerintahan otoritarian-kapitalistik ordebaru yang memuncak, telah menumbangkan kekuasaan tersebut dan menggantikannya dengan semangat baru pembangunan yang kemudian dikenal sebagai era-reformasi, sehingga pada fase ketiga ini pembangunan pedesaan lebih banyak dicirikan oleh pemenuhan kebutuhan akan penyaluran aspirasi politik dari pada pemenuhan kebutuhan fisik sebagaimana dilakukan pada masa sebelumnya.

Tabel 2. 1.

Perbedaan Pendekatan Lama dan Baru Pembangunan Pedesaan

Pendekatan lama	Pendekatan baru
Pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir → Tidak peduli pada hadirnya sindroma ketergantungan	Keadilan sosial, kedamaian, kualitas pertumbuhan, peningkatan kualitas lingkungan sebagai tujuan terpenting
Redistribusi kesejahteraan hanya dilakukan (melalui dan oleh) negara dan pasar → seringkali tidak fair	Merangkul semua pihak → dilakukan secara partisipatif → mengikutsertakan semua pihak
Tumbuhnya kekuasaan otoriter dipahami sebagai konsekuensi tak terelakan (harga) dari prestasi pencapaian pembangunan (target angka pertumbuhan)	Pencapaian kebebasan, otonomi, dan kedaulatan, sebagai prinsip penting pembangunan untuk direalisasikan → target pertumbuhan ekonomi agak terabaikan
Subsidi ekonomi disediakan oleh negara → rakyat sangat ketergantungan pada kekuatan negara → tuntutan berbagai hal terhadap negara menjadi sangat tinggi	Memberdayakan lokalitas untuk pertumbuhan secara mandiri (<i>self-reliance</i>) → <i>masyarakat lokal berparkarsa</i> dan ikut memecahkan

	segala persoalan
Transfer teknologi dan pembangunan berlangsung dari kawasan yang maju ke kawasan miskin → sindroma ketergantungan sangat tinggi	Pengembangan teknologi yang partisipatif dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal → <i>bottom up</i> , apresiasi terhadap <i>indigenous knowledge and local wisdom</i>
Pemerintah (negara) sangat menentukan nilai ekonomi suatu sumberdaya	Masyarakat lokal menentukan penilaian dan cara penilaian atas sumberdaya alamnya
Prinsip pembangunan kompartementalistik → terkotak-kotak berdasarkan bidang yang tersekat-sekat secara ketat → egoisme sektoral	Prinsip Pembangunan yang holistik dan mempedulikan semua aspek kehidupan, termasuk eksistensi komponen alam bukan manusia (<i>non human society</i>)
Peran negara sangat dominan dan kuat : sebagai <i>regulator, produser</i> , dan <i>provider</i>	Negara tidak dominan dan lebih banyak berperan memfasilitasi prakarsa mendorong komunitas lokal untuk lebih banyak berinisiatif

Sumber : Diadaptasikan dari Shepherd (1998)

Meski demikian, kebutuhan fisik dan ekonomi bukan berarti menjadi tidak penting lagi, pada fase ini, melainkan penyaluran aspirasi politik menjadi sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan fisik, karena selama rezim otoritarianisme semua saluran untuk menyuarakan pendapat, benar-benar tersumbat. Sejak saat itu maka pembangunan pedesaan mengambil format yang sangat berbeda. Perbaikan kesejahteraan sosial dan lingkungan didekati melalui perjuangan-perjuangan di wilayah politik, selain pendekatan fisik. Pada fase ini

ideologi *developmentalism* dikoreksi oleh ideologi *empowerment* dan pembangunan partisipatif, serta *sustainability*.

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pendekatan baru pembangunan pedesaan dicirikan oleh penghargaan pada eksistensi sumber daya alam dan lingkungan yang sangat tinggi, kemandirian lokalitas, partisipasi, dan basis kekuatan lokal yang kokoh. Ruh demokratisasi (kesetaraan dan kesejajaran), dan ekologisme (pembelaan terhadap alam) tampak sangat menonjol. Hal ini menghasilkan rejim pembangunan yang lebih populis dan memihak kalangan bawah, dimana negara atau pemerintah mengurangi kekuasaan politiknya untuk melakukan olah-kekuasaan hegemonik terhaap rakyatnya. Kesadaran akan keadilan dan ciri demokratisme menjadi indikator penting berkembangnya konsep pembangunan kontemporer terutama di Indonesia sejak era reformasi bergulir di tahun 1998.

4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menggunakan asumsi adanya ketidak-berdayaan yang membelenggu masyarakat karena kooptasi negara dan pasar, pembangunan berbasis komunitas memasuki tahap perjalanan pembangunan yang penting di dekade 1990an. Ada beberapa semangat atau prinsip penting yang mendasari aliran pembangunan kontemporer ini, yaitu partisipasi, demokratisasi, kesejateraan, kolektivitas, dan pembangunan yang diinisiasi oleh “kekuatan dari dalam”. Ideologi pemberdayaan dengan sengaja ditonjolkan sebagai satu-satunya identitas filosofis pendekatan ini.

Pada perkembangannya, banyak upaya pengembangan masyarakat (*community development*) yang mengambil strategi pemberdayaan sebagai pendekatan utamanya. Pendekatan ini menganalogikan masyarakat sebagaimana layaknya kesatuan “tubuh manusia” yang bisa mengalami perubahan, bergerak, berkembang, dan bahkan memiliki energi dan kekuatan dari dalam untuk berubah.

Pemaknaan konsep masyarakat dengan menganalogikan ibarat tubuh manusia itu, diinspirasi oleh pandangan yang menganggap masyarakat sebagai sebuah lapangan sosial (*social field*).

Menurut Wikinson (1972, hlm. 56), masyarakat sebagai sebuah lapangan sosial, masyarakat bersama-sama dengan bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya, seperti kelompok sosial (*social group*) dan organisasi, memiliki karakteristik sebagai berikut :

- (a) Adanya proses atau interaksi sosial yang berlangsung secara kontinu di dalamnya. Dinamika interaksi sosial ini menandakan bahwa ada kehidupan yang berarti dalam sistem kemasyarakatan.
- (b) Adanya arah perubahan ke suatu titik tertentu (*there is a direction toward some more or less distinctive outcome*), Artinya masyarakat tidak statis berada di satu titik dan tak pernah beranjak untuk berubah.
- (c) Ada perubahan atau perkembangan yang berlangsung secara teratur atas elemen dan struktur pembentukannya.

Sebagai turunan sebuah lapangan sosial Wikinson (1972, hlm. 58) memandang masyarakat sebagai lapangan sosial (*social field*) yang pemahaminya sebagai : “*a locality oriented social field which actions expressing a broad range of local interests are coordinated and organized*” Artinya, sebagai lapangan sosial, masyarakat tidak sekedar dipahami sebagai maknanya secara harfiah, namun masyarakat telah pula menjadi sebuah arena dimana pengaruh serta kekuatan-kekuatan lokal bekerja secara teratur dan terkoordinasi, dimana akhirnya menghasilkan perubahan-perubahan (*community changes*).

Mengacu pada pemahaman karakter masyarakat seperti di atas, maka bisa dimengerti bila konsep masyarakat dipandang layaknya sebuah organisme yang “hidup” (*a systemic unity*) dan bisa dibentuk serta ditumbuh-kembangkan (periksa Bell dan Newly, 1978). Dengan asumsi ini, dalam teori pembangunan muncul beberapa kajian tentang *community power*, yang menempatkan masyarakat pada

suatu tempat dan memiliki kapasitas sehingga mampu melakukan aktivitas proses-proses sosial (seperti; berinteraksi sesamanya, berkompetisi, bekerjasama, berkompromi, hingga berkonflik inter dan antar masyarakat lainnya).

Apakah sebenarnya *community empowerment* itu? Berbeda dengan pembangunan ala modernisasi yang berintikan pada pencapaian perubahan pada basis materialisme dan basis kulturalisme yang sengaja diarahkan (*intentionally directed toward specified end*). Dalam strategi pemberdayaan (proses pemberdayaan) ditekan seminimal mungkin terjadi. Wikinson (1972) memaknai pembangunan ala pemberdayaan adalah proses pembangunan yang lebih natural, dimana perumusan masalah, dan pencarian solusi diserahkan kepada masyarakat, dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah : “sebuah upaya perubahan (kemajuan) yang sengaja (*purposive*) dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota masyarakat itu sendiri, dimana mereka merumuskan masalah, menyusun rencana serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi mereka sendiri dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan (*improvement*) sebagaimana layaknya membangun sebuah bangunan, maka upaya perbaikan tersebut utamanya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang masyarakat yang bersangkutan.”

Pemahaman atas konsep pemberdayaan terus berkembang. Menyimak pendapat Christenson dan Robinson (1980), dan Fear dan Schwarzweller (1985) memahai konsep pemberdayaan masyarakat sebagai “sebuah proses perubahan yang inisiatifnya muncul dari anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.” Upaya ini jelas berbeda dengan pendekatan pembangunan ala modernisasi-sentralistik yang diturunkan secara *top-down*, sebagaimana ideologi *developmentalism* menggagasnya dalam teori “*diffusi-innovasi*”.

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa pengembangan masyarakat dapat dilihat dari gejala “ sekelompok orang yang bekerja secara bahu-membahu dalam sebuah setting masyarakat (lokal) dimana mereka menegakan prinsip musyawarah (*shered decision*) dalam merancang proses-proses perbaikan atau perubahan

secara partisipatif baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.” Dengan demikian, pembangunan mendapatkan pemahaman secara khusus, dimana makna dan konsep partisipasi masyarakat lokal menjadi kata kunci yang sangat penting. Fear dan Schwarzweller (1985) bahwa *community empowerment* dipahami sebagai “*a process in which increasingly more members of a given area or environment make and implement socially responsible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others.*” Dengan memperhatikan pemahaman konsep tersebut, maka pemberdayaan masyarakat dipahami secara khusus sebagai: “perubahan sosial yang terencana dan relevan dengan persoalan-persoalan lokal yang dihadapi oleh para anggota sebuah masyarakat (*a locality-relevant planned changes*) yang dilaksanakan dan keyakinan anggota masyarakat setempat, dimana prinsip-prinsip *resident participation* dijunjung tinggi.

Dalam hal ini konsep pemberdayaan (*empowerment*) dipahami dari berbagai sudut dan pengertian yang cukup beragam, namun mengerucut pada satu *focal point* yang jelas bahwa konsep “*Empowerment is viewed as a process ; the mechanism by which people , organization and communities gain mastery over their lives* (Rappaport, 1984 dalam Wiesbrg, 1999),. Selanjutnya Schneider (1999) memandang “*Empowerment goes well beyond bthe nerrow realm of political power, and differs from the classical definition of power by Max Weber. Empowermeni used to descibe the gaining of strength in the various ways necessary to be able to move out of poverty, rather than literally “ taking over power from somebody else” at the purely political level. This means, its includes knowladge, education, organization, rights, and ‘voice’ as wellas financial and material reseorces.*” Pemberdayaan juga bisa dipahami “*Empowerment may be understood as a process of transformation. This includes the transformation of the unequal power relationship, unjust struktures of society, and development policies. Empowerment also means transformation in the sense of changing and*

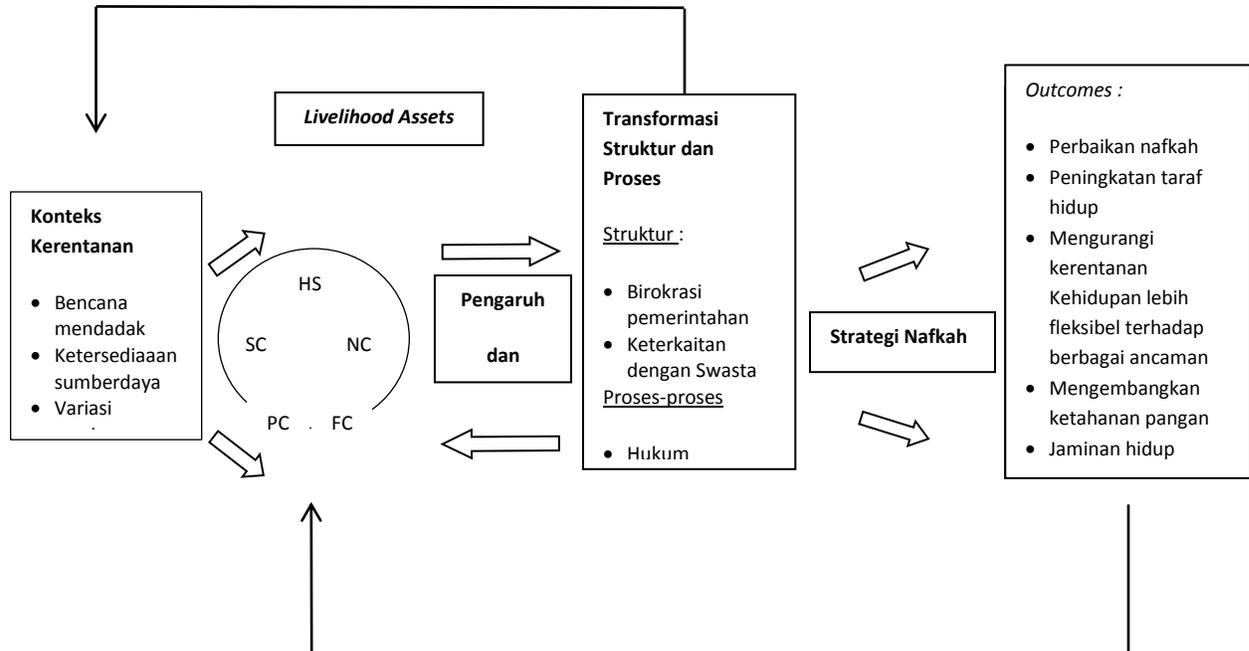
widening of individual's opportunities (Hacker, 1999). Sedangkan Dharmawan (2000), mendefinisikan pemberdayaan sebagai “*a process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to source of better living.*”

Pendekatan pembangunan ala pemberdayaan sebenarnya adalah reaksi atas pembangunan ala modernisasi yang dikemudian hari ternyata “ditunggangi” oleh kepentingan kapitalisme untuk mengembangkan “*world-capitalist economy (ideologi globalisme)*”. Pendekatan ala globalisme telah dipandang melumpuhkan sendi-sendi sosial-ekonomi dan politik lokal, sehingga perlu diimbangi oleh keberdayaan masyarakat. Keyakinan ini sesuai dengan *the crisis of community* yang ditandai oleh problematika ketertinggalan, ketidakberdayaan, kemiskinan, serta kehilangan identitas (Brox, 2006). Gagasan lokalisme dengan demikian merupakan *counter-action* atas pendekatan modernisme via globalisme yang dibawa oleh pemodal asing. Seagai pendekatan yang berbasis pada karakter lokal, maka pemberdayaan masyarakat lebih kental mencirikan pendekatan sesuai potensi dan *setting* sosio-budaya tempatan, sehingga bisa mewakili aliran pembangunan berorientasi pada lokalisme.

Satu hal yang perlu diingat dalam aliran pembangunan berorientasi lokalisme adalah adanya “dilema-lokalitas”, yaitu ketidakberfungsian sebuah program yang semula berjalan dengan baik di tingkat lokal, manakala program tersebut harus dijalankan atau dioperasionalkan di skala yang lebih luas dari skala lokal (supralokal). Infektivitas pembangunan lokalistik tersebut disebabkan hadirnya faktor ketidakcukupan prasyarat kekhasan sosio-budaya-politik lokal yang diperlukan untuk menopang berfungsinya sebuah program. Jadi dilema lokalitas muncul oleh karena persoalan inkompatibilitas atau ketidakcukupan prasyarat yang dimiliki oleh supra-lokalitas (*beyond locality*).

5. Sistem Nafkah Berkelanjutan (*Sustainable Livelihood System Approach*)

Pembangunan pertanian-pedesaan yang dipandu oleh ideologi *sustainability* memberikan platform yang jelas pada mekanisme penguatan kedaulatan civil society dan lokalitas untuk mengelola sepenuhnya sumberdaya alam dengan kearifan lokal yang dimiliki sesuai dengan etika ekosentrisme. Kesejahteraan sosial-ekonomi yang diperjuangkan dalam konsep *sustainable livelihood system* adalah sebuah derajat kesejahteraan sosial-ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada akumulasi modal kapital sesaat (sebagaimana yang dikenal oleh ideologi *development-moderimisme-kapitalisme*), namun lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang agar mereka minimal dapat meningkatkan kehidupan yang sama kuantitas dan kualitasnya dengan apa yang dinikmati oleh generasi masa kini, untuk lebih jelasnya dapat divisualisasikan pada gambar berikut



Gambar 2.1 : Sustainable livelihood framework
 Sumber : Diadaptasikan dari Farrington et..al, 1999, hlm. 89)

Keterangan :

SC : *Social capital* (modal sosial)

HC : *Human Capital* (modal manusia)

NC : *Natural capital* (modal alam)

FC : *Financial capital* (modal keuangan)

PC : *Physical capital* (modal fisik)

Konsep ini dikembangkan pertama kali di Inggris pada akhir dekade 1990an, namun didisain sedemikian rupa sehingga sangat relevan untuk kawasan sedang

berkembang. Pendekatan pembangunan ala *sustainable livelihood system* adalah pendekatan pembangunan kontemporer yang berusaha mengoreksi pendekatan pembangunan ala modernisasi yang dikenal sangat tidak akrab terhadap lingkungan. Pendekatan sistem nafkah berkelanjutan berusaha mencapai derajat kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ekologi secara adil dan seimbang. Pencapaian derajat kesejahteraan sosial didekati melalui komktivitas dan utilisasi modal-modal yang ada dalam tata sistem-nafkah, seperti contoh pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Sistem Nafkah Rumah tangga Pedesaan (Pertanian)

Strategi Nafkah yang Dijalankan	Sumberdaya Nafkah Tumpuan	Aktivitas Nafkah Utama	Pelaku Utama Aktivitas Nafkah	Orientasi Tujuan Utama Aktivitas Nafkah
Ekstensifikasi pertanian	Modal alam pertanian sawah	Penggarapan pada berbagai jenis lahan secara → bersamaan untuk optimasi hasil pertanian	Orangtua (kepala rumah tangga) sebagai pelaku dan anak sebagai pembantu utama	<i>Survival</i> dan jaminan keamanan konsumsi dan pengembangan aset ekonomi rumah tangga

Strategi Nafkah yang Dijalankan	Sumberdaya Nafkah Tumpuan	Aktivitas Nafkah Utama	Pelaku Utama Aktivitas Nafkah	Orientasi Tujuan Utama Aktivitas Nafkah
Substitusi-lahan	Modal alam	Penggarapan lahan hutan (hasilnya untuk menyewa sawah)	Kepala rumah tangga sebagai tenaga kerja utama dibantu oleh anak	Memastikan lahan sawah sumber → subsistensi rumah tangga
Investasi sosial (<i>social asset investment</i>)	Modal social	Membangun jaringan sosial antar rumah tangga yang berguna sebagai sarana memperoleh pekerjaan	Kepala rumah tangga dan anak	Keamanan sosial dan kesejahteraan material-psikologikal di masa depan
Integrasi sosial	Modal sosial	Berusaha untuk tetap menjadi anggota → komunitas dan membangun keselarasan sosial Dengan harapan jaminan keamanan sosial	Dengan tetap tinggal di desa, para kepala rumah tangga dapat memelihara harmonisasi nilai yang berlaku di masyarakat lokal	Antisipasi keamanan sosial nafkah terutama untuk menghadapi situasi emergensi (krisis)
Pengembangan sistem asuransi sosial internal keluarga	Modal alam dan modal sosial	Persiapan dan pengembangan asset natural untuk persiapan hari tua	Keluarga besar (<i>extended family</i>) → menyiapkan bekal nafkah bagi anak cucunya sebagai bagian	<i>Survival</i> dan keamanan sosial dan jaminan ekonomi di hari tua

Strategi Nafkah yang Dijalankan	Sumberdaya Nafkah Tumpuan	Aktivitas Nafkah Utama	Pelaku Utama Aktivitas Nafkah	Orientasi Tujuan Utama Aktivitas Nafkah
			strategi pengamanan social di masa tua	
Migrasi untuk bekerja di sector non-pertanian dan menciptakan <i>remittance-economy</i>	Modal sosial yang dibangun bersama-sama warga sedesa	Bekerja sebagai pekerja bangunan	Kepala keluarga (suami) bekerja di perantauan dan istri di rumah	<i>Survival</i> dan akumulasi aset rumah tangga
Kemitraan usaha suami-istri	Modal social, modal finansial	Membuka warung, menjadi tukang	Kepala keluarga (suami) dan istri bekerja bersama-sama	<i>Survival</i> dan peningkatan kesejahteraan material serta keamanan sosial
<i>Rular non-farm activities</i>	Modal Finansial	Bekerja di sektor jasa atau perdagangan	Kepala keluarga (suami)	<i>Survival</i> dan pembangunan aset rumah tangga

Sumber : Diinterpretasi ulang dari Purnomo (2006, hlm. 78)

Sejumlah prinsip penting yang diperlukan untuk memahami konsep pembangunan dengan pendekatan *sustainable livelihood mechanism* adalah :

- (1) Landasan etika pembangunan, adalah ekosentrisme, yaitu menghargai kesejajaran antara kepentingan manusia dan alam secara seimbang. Artinya manusia dan alam hidup seiring-sejalan dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Etika ini menghindari perilaku eksploitatif demi pencapaian derajat kesejahteraan manusia.

- (2) Ideologi *environmentalisme* dan *ecomodernisme* melandasi gerakan sosial masyarakat dalam berperilaku pelestarian lingkungan. Ideologi ini tetap menempatkan pencapaian kehidupan manusia yang sejahtera, dalam waktu yang bersamaan tetap memandang penting pula untuk mengupayakan penyelamatan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan demi kehidupan manusia dan alam itu sendiri.
- (3) Mungubah persepsi tentang pembangunan dari ciri eksploitatif ke ciri kearifan terhadap alam.
- (4) Konsep *rural sustainable community empowerment* yang menyertai proses-proses pengambilan keputusan, mengindikasikan adanya komitmen yang kuat atas pencapaian cita-cita keadilan lingkungan.

Karakter *konservative* dan *populisme* yang menjiwai pendekatan *sustainable livelihood system* ditunjukkan dengan hadirnya lima modal yang derajat, posisi dan statusnya sama (periksa gambar 2.1) yang membangunkan sistem kehidupan masyarakat.

Ciri *conservatisme* dalam pendekatan ini adalah diletakkannya *natural capital* sebagai entitas modal yang terpisah. Dalam ekonomi konvensional, modal alam dikenal secara sempit sebagai tanah (*land*) yang menjadi sumber daya dan sekaligus sebagai tempat produksi semata-mata. Dengan memandang alam sebagai modal, maka tidak hanya tanah yang diakui eksistensinya, melainkan juga *biodiversity*, air, udara, hutan, sungai, tanah, jasad-renik, dan lain sebagainya. Terdapat asumsi yang dipegang dalam hal ini, adalah sistem kehidupan akan terus berlanjut jika dan hanya jika modal alam diletakkan eksistensinya.

Sementara itu, ciri populisme ditunjukkan dengan kehadiran *social capital* (modal sosial) dalam sistem, modal sosial dianggap sangat penting dalam konsep pembangunan kontemporer, karena fungsinya sebagai perekat elemen-elemen

masyarakat, tiga kompoenen utama dalam hal ini adalah (1) *Trust*, maksudnya Kepercayaan antar anggota masyarakat yang memudahkan proses komunikasi dan pengelolaan suatu persoalan serta mengurangi biaya transaksi, (2) *social-networking*, berupa jejaring individu, kelompok, atau organisasi berbentuk ikatan (*bond*) dan pertemanan (*bridge* untuk mendukung gerak aksi kolektivitas menjadi semakin sinergis, dan (3) *norms and institution*, adalah norma-norma dan sistem nilai yang mengawal serta menjaga proses pembangunan sehingga tidak mengalami penyimpangan.

Ketiga bentuk modal lain yaitu *human capital* berupa kemampuan, keterampilan dan kapasitas sumber daya maniasi, serta *finansial capital* ata uang dan *physical capital* beruppa infrastruktur fisik penopang pembangunan. Kelima modal ini dimanfaatkan searif mungkin untuk menyongsong kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

C. Konsep dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian dan Proses Pemberdayaan

Meminjam asumsi adanya ketidakberdayaan yang membelenggu masyarakat karena kooptasi penguasa dan pasar, pengembangan masyarakat memasuki perjalannya pada dekade 1990an pada fase ideologi pemberdayaan (*empowerment*), pembangunan partisipatif, serta *sustainability*. Ada beberapa semangat atau prinsip penting yang mendasari paham pembangunan kontemporer ini, yaitu : partsispasi, demokratisasi, kesejahteraan, dan kolektivitas, serta pembangunan yang diinisiasi oleh kekuatan-kekuatan dari dalam, idiologi pemberdayaan ini sengaja ditonjolkan sebagai identitas filosofi pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Weissglass (1990, hlm. 98) dalam Friedmann (1992, hlm. 101) mengemukakan, bahwa: “pemberdayaan adalah proses membantu individu, kelompok, masyarakat dalam menciptakan pemahaman baru

sekaligus memberikan kebebasan untuk membuat pilihan”. Selanjutnya Irwin (1995) dalam Brown (1998, hlm. 105) mengatakan: “pemberdayaan adalah proses memberikan kesempatan dalam menciptakan berbagai kontribusi khusus dalam bentuk wawasan, keterampilan–keterampilan, energi tertentu atau dalam bentuk pemberian perhatian terhadap sesama”. Lebih jauh lagi Glickman (1989) dalam Robinson (1994, hlm. 112) mengemukakan, bahwa: “pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan dan kemampuan dalam diri seseorang seperti kompetensi, kreativitas melalui kontrol internal dalam bertindak dan memecahkan masalah-masalahnya secara mandiri”. Sedangkan Kindervatter (1979, hlm. 13) mengartikan pemberdayaan (*empowering*) adalah “*people gaining an understanding of and control over social, economic, and/or political forces in order to improve their standing in society*”. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Selanjutnya Gunawan Sumodiningrat (1999, hlm. 24) mengemukakan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Pembangunan Nasional, yaitu pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang : pertama : penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, kedua : peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah, ketiga : perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. (Gunawan Sumodiningrat, 1999, hlm. 254-255) Dennis Salebey (1992, hlm. 66), mengemukakan terdapat dua dimensi dalam memahami proses pemberdayaan, yaitu:

1. Secara konseptual, proses pemberdayaan dilaksanakan melalui gagasan pendidikan atau melalui proses pendidikan kesadaran (*Consciousness Education*).

2. Secara empirik, proses pemberdayaan sering dirangsang melalui latihan pengujian partisipasi pada tingkat komunitas yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan membantu masyarakat memahami sistem-sistem yang membatasi dan menghambat kehidupan mereka sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan berbagai aksi untuk keluar dari permasalahannya.

Ronald Lippit (1958, hlm. 89), menuturkan; proses pemberdayaan dibagi ke dalam lima tahapan sebagai berikut: (1) Pengembangan kebutuhan akan perubahan (*unfreezing*), 2) Pemantapan relasi perubahan, (3) Melakukan perubahan (*Freezing*) 4) Generalisasi dan stabilisasi perubahan (*Refreezing*), dan (5) Terminasi

Jim Ife (1995, hlm. 64), menggambarkan pemberdayaan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Sasaran Pemberdayaan Pada Beberapa Kelompok Kurang Beruntung di Dalam Masyarakat

Meningkatkan keberdayaan	Kelompok kurang beruntung yang bersifat struktural	Kelas : Masyarakat miskin Penganggur Pekerja berpendapatan rendah Jender: Wanita Ras/Etnisitas: Penduduk asli minoritas
	Kelompok kurang beruntung lainnya:	Lanjut usia Anak dan pemuda Cacat Kaum homoseks Masyarakat terasing dll
	kekurang beruntungan	Yang mengalami masalah kedudukan, kehilangan masalah keluarga dan lain-lain
Dalam hal	Pilihan-pilihan pribadi dan kesempatan hidup Pendefinisian kebutuhan Pengungkapan gagasan-gagasan Mempengaruhi lembaga-lembaga	

	Penggalian sumber-sumber Melakukan aktivitas ekonomi Melakukan reproduksi
Melalui	Kebijakan dan perencanaan Aksi sosial dan politik Pendidikan

Sumber : Jim Ife, 1995. *Community Development. Creating Community Alternatives– Vision, Analysis and Practice*. Australia, Longman.

Gambar tersebut, memberikan suatu kejelasan bahwa kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung, menurut Jim Ife (1995, hlm. 64), strategi pemberdayaannya diarahkan melalui pilihan-pilihan pribadi dan kesempatan-kesempatan hidup yang mencakup: bagaimana pendefinisian kebutuhan, bagaimana pengungkapan gagasan-gagasan, bagaimana mempengaruhi lembaga-lembaga terkait, bagaimana upaya penggalian sumber-sumber, bagaimana melakukan aktivitas ekonomi, dan bagaimana melakukan reproduksi. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kebijakan dan perencanaan yang mencakup bagaimana kebijakan dan perencanaan aksi sosial dan politik serta bagaimana kebijakan dan perencanaan pendidikan bagi kelompok masyarakat. Dengan demikian strategi pemberdayaan bagi kelompok masyarakat dapat:

1. Melalui kebijakan dan perencanaan dengan merubah struktur dan institusi pelayanan kelompok masyarakat yang ada sekarang.
2. Melalui aksi sosial dan politik dengan mengadakan perubahan politik melalui aksi langsung kepada kelompok masyarakat.
3. Melalui pendidikan dan penyadaran dengan proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok masyarakat.

Konsep pemberdayaan dalam penelitian ini, merujuk pula pada konsep yang dikembangkan Kindervatter (1979, hlm. 9). Konsep dasar yang menjadi kajiannya berangkat dari suatu konsep bahwa pendidikan non-formal sebagai suatu *Empowering Process*. Asumsinya adalah dengan pendekatan pendidikan, seseorang dapat diberdayakan, dan pemberdayaan ini akan memberikan sumbangan pada jenis perkembangan tertentu yaitu sumber-sumber dapat didistribusikan lebih merata. Pendidikan nonformal sebagai *empowering process* menekankan pemanfaatan kemampuan untuk kerjasama menyelesaikan struktur sosial ekonomi dan yang berkaitan dengan itu melalui kerjasama atau kerja kelompok. Sebagai *empowering process*, seseorang, kelompok orang atau masyarakat akan meningkatkan derajat kehidupannya dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memahami dan mengendalikan keadaan sosial, politik dan ekonominya. Jadi, dengan pengetahuan dan keterampilan yang didapat, seseorang akan menjadi lebih berdaya. Tujuan akhir upaya pemberdayaan adalah perolehan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.

Kindervatter mengajukan delapan karakteristik dari *empowering process* (1979, hlm. 152-153), yaitu: (1) *Small group structur*. menekankan aktivitas dan otonomi kelompok kecil. Batasan kelompok ini bisa didasarkan oleh kesamaan minat dan lain-lain, (2) *Transfer of responsibility*. Selama pelaksanaan pembelajaran, partisipan mungkin enggan atau ragu dilibatkan tetapi lama kelamaan setelah berpengalaman hal ini dapat diatasi, (3) *Participant leadership*. Partisipan diberikan kesempatan melakukan latihan mengambil keputusan pada seluruh aspek aktivitas organisasi. Pimpinan hanya bersiap-siap membantu kalau mereka menemui kesulitan, (4) Agen

sebagai fasilitator. Diluar tugas agen juga sebagai pelayan di dalam mengarahkan proses, sebagai narasumber, mengajukan masalah dan lain-lain. Seorang fasilitator sepakat terhadap sasaran pemberdayaan dan memperlihatkan pendukungnya di dalam melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, (5) *Democratis and non-hierarchical relationship and process*. Semua pendapat sama dan keputusan diambil berdasarkan konsensus suara terbanyak. Peran dan tanggung jawab didistribusikan secara merata. Di dalam beberapa hal, partisipan mungkin tidak memahami cara kerja sama dan demokrasi. Karena itu, dibutuhkan proses latihan. 6) *Integration of reflection and action*. Pengalaman partisipan dan perbaikan masalah dijadikan fokus. Analisa kerjasama untuk meningkatkan perubahan yang dapat melibatkan personel, adalah pemecahan masalah, perencanaan, pengembangan keterampilan, dan/atau perselisihan, (7) *Method wich encourage selp-reliance*. Teknik yang digunakan untuk meningkatkan keterlibatan aktif warga belajar adalah dialog, dan aktivitas kelompok mandiri seperti belajar sesama teman, jaringan kerja, workshop, menyediakan alat yang dapat digunakan oleh partisipan secara mandiri, latihan mengekspresikan diri sendiri dan permainan, (8) *Improvement of social, economic, and/or political standing*. Sebagai hasil *empowering process*, partisipan dapat meningkatkan kemampuan di bidang khusus di dalam masyarakat.

Adapun strategi yang ditempuh di dalam *empowering process* adalah: (1) pengorganisasian masyarakat di dalam memperbaiki dan mengubah kondisi sosial, ekonomi dan lingkungannya, (2) memanageren diri sendiri dan kerja sama, untuk menjaring kekuatan kerja sama melalui pembinaan hubungan baik antara anggota, (3) pendekatan partisipatoris, untuk menyiapkan orang-orang yang mengendalikan hakekat dan arah perubahan yang direncanakan, dan (4) pendidikan keahlian, untuk membantu menyadarkan orang-orang akan ketidakmerataan dan kemampuan memecahkan.

Dalam kaitannya dengan partisipasi warga belajar Kindervatter, (1979, hlm. 137) menyatakannya bahwa secara aktif merupakan salah satu dimensi tujuan di

dalam *empowering process*. Ia mengemukakan sepuluh karakteristik pendekatan partisipatoris, yaitu: (1) memberi kuasa bukan hanya kepada advisor tetapi kepada warga belajar sebagai pengambil keputusan pada semua aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, (2) mengikutsertakan sejumlah orang seperti para pimpinan informal atau mereka yang mewakilinya, para profesional, dan atau anggota yang aktif di dalam kelompok, (3) mendasarkan pada minat dan kebutuhan warga belajar, (4) permasalahan dan pemecahannya berasal dari dan ditentukan oleh partisipan melalui diskusi dan lain-lain, (5) menggunakan metode yang dapat mengembangkan ekspresi diri dan dialog, (6) keuntungan dirasakan secara langsung oleh partisipan, 7) memperlakukan agen perubahan sebagai fasilitator, memasukkan petunjuk, sumber materi ajar, dan mengkaitkannya dengan sumber luar, (8) mengakui pentingnya latihan bagi agen perubahan guna menyamakan pengertian tentang penggunaan prinsip partisipatoris, (9) melaksanakan kegiatan berdasarkan struktur yang ditentukan bersama, dan (10) mengoperasikan kegiatan berdasarkan prinsip yang ditentukan.

Secara operasional Kindervatter (1979, hlm. 247) mengemukakan bahwa : *Empowering process* memiliki sebelas dimensi, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan nonformal, yaitu: (1) *structure*, menekankan pada aktivitas dan otonomi kelompok kecil yang anggotanya mempunyai latar belakang dan minat yang sama, (2) *setting time*, ditentukan oleh warga belajar dan pertemuannya dilakukan secara informal di lingkungan masyarakat, (3) *Role of learner*, warga belajar dan fasilitator bekerja sama membuat keputusan di dalam semua aspek program. Warga belajar berangsur-angsur mengambil alih kepemimpinan dan tanggung jawab dari fasilitator, (4) *Role of facilitator*, mendukung warga belajar melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, membantu warga belajar menyusun pengalaman belajar, secara ideal dari masyarakat warga belajar, 5) *Relationship between learners and facilitator*, status perbedaan fasilitator dan partisipan dihilangkan, melainkan hubungan kemajuan program. Aktivitas warga belajar semakin meningkat dan aktivitas fasilitator semakin menurun. berdasarkan respek yang saling menguntungkan, (6) *Needs assessment*,

kebutuhan muncul dari minat dan masalah kehidupan nyata warga belajar yang diidentifikasi melalui proses dialog antara warga belajar dan antara fasilitator dengan warga belajar dan seterusnya, (7) *Curriculum development*, berkembang, terbuka dan lentur. Tujuan umum dibuat secara luas tetapi tujuan khusus dan rencana pembelajaran dikembangkan dari satu tahap ke tahap berikutnya, 8) *Subject matter, fasilitator* membantu warga belajar mengembangkan dan menyelesaikan sumber yang digunakan. Isi pembelajaran meliputi dua bidang, yaitu (a) tujuan proses dikaitkan dengan pemecahan masalah kelompok, dan (b) tujuan isi dikaitkan dengan informasi, keterampilan, atau proyek aksi masyarakat yang ditentukan warga belajar sendiri, (9) *Material*, biasanya bukan paket, dikembangkan oleh warga belajar bersama fasilitator sebagai alat untuk memberikan stimulus mengidentifikasi dukungan kelompok. Termasuk photo, audio tapes, cerita, bulletin dan sejenisnya, *chart*, dan lain-lain, (10) *Method*, aktivitas kelompok kecil yang terstruktur, diskusi, pengembangan keterampilan, perencanaan dan implementasi proyek. Mengajukan pengembangan kelompok kecil seperti dialog, dan lain-lain. (11) *Evaluation*, warga belajar secara kontinue menilai perkembangan dan pengaruhnya pada masyarakatnya. Warga belajar tidak dievaluasi, mereka evaluator yang bekerja sama dengan fasilitator. Alat evaluasi yang digunakan sederhana sehingga warga belajar dapat menerapkannya sendiri walaupun tidak ada sumber belajar yang memberitahukan.

Dalam proses pemberdayaan hal yang dilakukan seorang pelaku perubahan terhadap target perubahan baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas adalah upaya mengembangkan dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sehingga target perubahan tersebut mempunyai kekuatan dalam penentuan keputusan dan tindakan atas hidup mereka dengan meningkatnya kapasitas dirinya. Proses tersebut bisa terjadi dengan menggunakan atau melalui transfer daya dari lingkungan ke target perubahan. (Dayal, 1997, hlm. 23)

1. Indikator Pemberdayaan

Indikator pemberdayaan dapat dilihat secara individual dan kolektif. Iwan Setiawan (2008, hlm. 20) menyatakan bahwa:

Pemberdayaan sejatinya merupakan proses penguatan akses informasi, kesadaran dan partisipasi, kapasitas kelembagaan, tanggung jawab, modal-modal sosial (tata nilai, *trust*, kerja sama, koordinasi, jaringan), karsa, kreativitas, daya juang, kejujuran, kepedulian, keinovatifan, daya kritis, daya evaluasi (kontrol), dan kemandirian, baik kepada personal, organisasi, komunitas, maupun institusi.

Ruth Alsop dan Nina Heinsohn (2005, hlm. 44) yang mengatakan bahwa mengukur pemberdayaan secara langsung dapat dibuat melalui penilaian:

- a. *Whether an opportunity to make a choice exists (existence of choice)?*.
Apakah ada kesempatan untuk membuat pilihan?
- b. *Whether a person actually uses the opportunity to choose (use of choice)?*.
Apakah seseorang mengaktualisasikan atau menggunakan kesempatan tersebut untuk memilih/memutuskan?
- c. *Whether the choice resulted in the desired result (achievement of choice)?*.
Apakah pilihan tersebut menjadi solusi dari kebutuhan?

Indikator pemberdayaan secara individual diidentifikasi oleh Jim Ife (2006, hlm. 71-73) sebagai kekuasaan yang ada dalam individu dan masyarakat. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2006, hlm. 63-66) sebagai bentuk peningkatan kedudukan dalam masyarakat yang masing-masing mengembangkan delapan indikator keberdayaan masyarakat yang disebut dengan indeks pemberdayaan.

Tabel 2.4

Indikator Keberdayaan Secara Individual

Aspek	Indikator Keberdayaan Masyarakat secara Individual	
	Jim Ife (2006: 71-73)	Schuler, Hashemi dan Riley (Suharto, 2006: 63-66)
Kekuasaan atas pilihan-pilihan	a. Kekuasaan atas pilihan pribadi dan peluang	a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk

Aspek	Indikator Keberdayaan Masyarakat secara Individual	
	Jim Ife (2006: 71-73)	Schuler, Hashemi dan Riley (Suharto, 2006: 63-66)
dan terlibat dalam pembuatan keputusan dalam rumah tangga	kehidupan, seperti kekuasaan untuk menentukan jalannya hidupnya sendiri, seperti menentukan gaya hidupnya, tempat tinggal, pilihan tentang kesehatan, seksualitas mereka sendiri serta kekuasaan yang menyangkut masa depan pribadi mereka.	pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
	b. Kekuasaan atas reproduksi. Kontrol atas proses reproduksi, termasuk membesarkan anak, pendidikan dan sosialisasi.	b. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
	c. Kekuasaan atas definisi	c. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing

Aspek	Indikator Keberdayaan Masyarakat secara Individual	
	Jim Ife (2006: 71-73)	Schuler, Hashemi dan Riley (Suharto, 2006: 63-66)
	kebutuhan, seperti kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya, memiliki akses pada pendidikan dan informasi, pengakuan atas kearifan lokal, pengetahuan dan pengalaman lokal sebagai relevan dan sah.	untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
Kekuasaan dalam kegiatan politik dan kekuasaan untuk memberikan gagasan	d. Kekuasaan untuk mempertahankan HAM. e. Kekuasaan atas gagasan seperti: kemampuan mengekspresikan dan	d. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil ; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah. e. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/

Aspek	Indikator Keberdayaan Masyarakat secara Individual	
	Jim Ife (2006: 71-73)	Schuler, Hashemi dan Riley (Suharto, 2006: 63-66)
	menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan, kapasitas masyarakat untuk melakukan dialog dengan sesama dan kemampuan gagasan masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada kultur publik	kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
Kekuasaan atas sumber-sumber	f. Kekuasaan atas sumber - sumber, seperti keleluasaan atas pemanfaatan sumber daya baik keuangan maupun untuk sumber daya non-keuangan, seperti pendidikan, kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, rekreasi, perumahan, pekerjaan dan pengalaman kebudayaan	f. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, <i>asset</i> produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.
Kekuasaan atas kegiatan ekonomi	g. Kekuasaan atas kegiatan ekonomi, seperti kekuatan untuk mengendalikan mekanisme dasar dari	g. Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga

Aspek	Indikator Keberdayaan Masyarakat secara Individual	
	Jim Ife (2006: 71-73)	Schuler, Hashemi dan Riley (Suharto, 2006: 63-66)
	produksi, distribusi dan pertukaran	sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
		h. Kemampuan membeli komoditas besar : kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang

Aspek	Indikator Keberdayaan Masyarakat secara Individual	
	Jim Ife (2006: 71-73)	Schuler, Hashemi dan Riley (Suharto, 2006: 63-66)
		tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri

Sumber: Suharto (2006, hlm. 63-66)

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Menurut Edi Suharto (2006, hlm. 64), indikator keberdayaan masyarakat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5

Indikator Keberdayaan Masyarakat

Jenis hubungan kekuasaan	Kemampuan ekonomi	Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan	Kemampuan kultural dan politis
Kekuasaan di dalam: meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya • Keinginan untuk memiliki kesempatan ekonomi yang setara • Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan diri dan kebahagiaan • Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara • Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain • Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Assertiveness dan otonomi • Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik • Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik
Kekuasaan untuk:	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas dan

Jenis hubungan kekuasaan	Kemampuan ekonomi	Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan	Kemampuan kultural dan politis
meningkatkan kemampuan individu untuk berubah ; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses	<p>pelayanan keuangan mikro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pendapatan • Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga • Akses terhadap pasar • Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak 	<p>termasuk kemelekan huruf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status kesehatan dan gizi • Kesadaran mengenai akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi • Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik 	<p>akses terhadap dunia luar rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan budaya • Kemampuan untuk menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik, dan kebudayaan
Kekuasaan atas: perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. • Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya. • Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi atas urutan konsumsi keluarga dan aspek yang bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga berencanaan • Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekuasaan keluarga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat • Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik.

Jenis hubungan kekuasaan	Kemampuan ekonomi	Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan	Kemampuan kultural dan politis
Kekuasaan dengan: meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga • Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar • Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern • Mampu memberi gaji terhadap orang lain • Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar, dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan diri terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga • Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat kritis • Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat • Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subkoordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada masyarakat dan makro.

Sumber : di Suharto (2006:64)

Menurut Kamil (2009, hlm. 59), *output/ impact* dari proses pemberdayaan adalah “menciptakan masyarakat yang responsif, terampil, dan kolaboratif untuk meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat”. Sama halnya dengan Kamil,

Kindervater (1979, hlm. 63) yang mengartikan “pemberdayaan sebagai orang yang memperoleh pemahaman dan kontrol atas kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik untuk meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat”. Indikator dari peningkatan kedudukan yang dikembangkan oleh *Inter America Foundation* (IAF) dalam Kindervater, (1979, hlm. 63) adalah sebagai berikut:

- a. *Access : greater opportunities to obtain resources*: meningkatnya kesempatan untuk memperoleh sumber daya.
- b. *Leverage : increasing in collective bargaining strength*: peningkatan kekuatan posisi tawar secara kolektif.
- c. *Choices: ability and opportunity to choose amongst options*: kemampuan dan peluang untuk memilih diantara pilihan-pilihan.
- d. *Status : improved self image, esteem, and positive sense of cultural identity* : memperbaiki konsep diri, penghargaan diri dan identitas budaya yang positif.
- e. *Critical reflection capability: using experience to accurately assess the potential merits of competing problem solving options* : menggunakan pengalaman untuk menilai/ menaksir dengan teliti pilihan persaingan pemecahan masalah jasa potensial.
- f. *Legitimation: people's demands considered by officials as just and reasonable*: mempertimbangkan permintaan orang dengan adil dan pantas
- g. *Discipline: self imposed standards for working productively with others*: standar disiplin diri untuk bekerja secara produktif dengan yang lainnya.
- h. *Creative perception: a more positive and innovative view of one's relationship to his/ her milieu: persepsi yang kreatif*: pandangan yang lebih positif dan inovatif dalam hubungan dengan lingkungan pergaulannya. (Kindervater, 1979, hlm. 63)

Indikator pemberdayaan masyarakat secara kolektif menurut World Bank 2002, Gabriel Chanan 2009, Glenn Laverack 2001 :

Tabel 2.6
Indikator Keberdayaan Masyarakat Secara Individual
Dalam Kelompok Masyarakat

Aspek	Indikator Keberdayaan Masyarakat secara Individu dalam Kelompok Menurut		
	World Bank (2002) dalam Zaki Mehchy dan Nader Kabbani (2007:7)	Gabriel Chanan <i>National empowerment Partnership shoutwest Foundation</i> (2009:12)	Glenn Laverack (2001:2)
(Peningkatan kesadaran terhadap potensi diri dan sumber-sumber produktif)		<i>a. Aware.</i> <i>b. Awareness of community source of benefit.</i>	
Peningkatan akses dan penguatan jaringan	<i>a. Access to information</i>	<i>c. Access to d. Network strengthening</i>	<i>a. Strengthening link to other organisations and people</i> <i>b. Creating an equitable relationship with outside agents</i>
Peningkatan partisipasi dan daya kritis	<i>b. Inclusion and participation</i>	<i>e. Widening participation</i>	<i>c. Improving participations</i> <i>d. Enhancing the ability to "ask why"</i>

Aspek	Indikator Keberdayaan Masyarakat secara Individu dalam Kelompok Menurut		
	World Bank (2002) dalam Zaki Mehchy dan Nader Kabbani (2007:7)	Gabriel Chanan <i>National empowerment Partnership shoutwest Foundation (2009:12)</i>	Glenn Laverack (2001:2)
Akuntabilitas	<i>c. Accountability</i>		
Peningkatan tanggung jawab	<i>f. Widening responsibility</i>		
Peningkatan kapasitas organisasi lokal	<i>d. Local organisational capacity</i>	<i>g. Boost to independent community organisations</i>	<i>e. Building empowering organisational structure</i> <i>f. Increasing problem assessment capacities</i> <i>g. Increasing control over programme management</i> <i>h. Developing local leadership</i>
Peningkatan mobilisasi sumber daya	<i>i. Improving resource mobilization</i>		

Sumber: World Bank 2002, Gabriel Chanan 2009, Glenn Laverack 2001

Menurut Bartle (2002, hlm. 28), ada 16 (enam belas) elemen kekuatan atau pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Mendahulukan kepentingan umum, yaitu porsi dan tingkat kesiapan individu, mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruh masyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan, kemanusiaan, individu, pengorbanan personal, kebanggaan masyarakat, saling mendukung, setia, peduli, persahabatan, persaudaraan).

- b. Kesamaan nilai, yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilai, khususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikan kepentingan anggota dalam masyarakat.
- c. Layanan masyarakat, yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan, pasar, air minum, jalur pendidikan, layanan kesehatan), yang dipelihara secara berkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitas dan layanan.
- d. Komunikasi dalam masyarakat, dan diantara masyarakat dengan pihak luar. Komunikasi termasuk jalan, metode elektronika (seperti telpon, radio, TV, internet), media cetak (koran, majalah, buku), jaringan kerja, bahasa yang dapat saling dimengerti, kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasi secara umum.
- e. Percaya diri, meskipun percaya diri diekspresikan secara individual, namun seberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakat? misalnya suatu kesepakatan dimana masyarakat dapat memperoleh harapan,
- f. sikap positif, keinginan, motivasi diri, antusiasme, optimisme, mandiri, keinginan untuk memperjuangkan haknya, menghindari sikap masa bodoh dan pasrah, dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai.
- g. Keterkaitan (politis dan administratif), suatu lingkungan yang mendukung penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasional, hukum dan legislatif) dan elemen administratif (sikap dari pegawai dan teknisi sipil, sebaik peraturan dan prosedur pemerintah), dan lingkungan hukum.
- h. Informasi, kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, tingkat kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individu dan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif dan berguna, tidak sekedar volume dan besaran.
- i. Rintangan, pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan, pelatihan manajemen, munculnya kepedulian, rangsangan) apakah ditujukan pada

perkuatan masyarakat? Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkan tingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat, atau menantang masyarakat untuk bertindak menjadi lebih kuat? Dan apakah rintangan itu bersifat berkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan oleh pendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda dari masyarakat itu sendiri?.

- j. Kepemimpinan, pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan, pengaruh, dan kemampuan untuk mengerakkan masyarakat. Pemimpin yang paling efektif dan berkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat, memiliki kedudukan dan penentu kebijakan. Pemimpin harus memiliki keahlian, kemauan, kejujuran dan beberapa karisma.
- k. Jaringan kerja, tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahui. Apakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahui orang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakan sumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secara keseluruhan? Serta memanfaatkan hubungan, potensi dan kebenaran, dalam masyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat.
- l. Organisasi, adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu, melainkan hingga integritas organisasi, struktur, prosedur, pengambilan keputusan, proses, efektifitas, divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi.
- m. Kekuatan politik, tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalam pengambilan keputusan daerah dan nasional. Namun sebagai individu yang memiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional.
- n. Keahlian, kemampuan (kemampuan teknis, kemampuan manajemen, kemampuan berorganisasi, kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan oleh individu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga mereka mampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan.

- o. Kepercayaan, tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakat terhadap sesamanya, khususnya pemimpin dan abdi masyarakat, yang merupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran, ketergantungan, keterbukaan, transparansi, azas kepercayaan) dalam masyarakat.
- p. Keselarasan, pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusun masyarakat, meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan (agama, kelas, status, penghasilan, usia, jenis kelamin, adat, suku), tingkat toleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu dan lainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama, suatu rasa kesamaan tujuan atau visi, perataan nilai.
- q. Kekayaan, tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumber daya aktual, dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang dan bermanfaat, keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerja, tanah, peralatan, persediaan, pengetahuan, keahlian).

Commision on woman and development (2007, hlm. 13), mengidentifikasi empat aspek pemberdayaan masyarakat, yakni:

- a. *Assets (power to)*. Konsep ini mengacu pada kekuatan ekonomi yang lebih besar dalam hal aset material seperti pendapatan, tanah, alat atau teknologi. Kekuatan ini menjadi kata, ekonomi tersebut tidak terbatas pada kepemilikan sumber daya dan kekayaan, tetapi juga termasuk kesehatan yang lebih baik, lebih banyak waktu, akses ke layanan tertentu seperti kredit, informasi dan pelatihan, pusat kesehatan dan pasar dan lain-lain. Indikator di tingkat "aset" harus memungkinkan kita untuk memantau peningkatan kekuatan ekonomi: peningkatan modal atau pendapatan, sarana yang lebih baik dari produksi seperti tanah atau teknologi, perawatan kesehatan baik untuk keluarga mereka, waktu yang diperoleh untuk memproduksi, untuk menghabiskan dengan anak-

anak, untuk bersantai, informasi lebih lanjut di pasar dan harga, aliran pasar membaik, dan lain-lain.

- b. ***Knowledge and Know-How*** (*power to*). Ini berarti memiliki pengetahuan lebih praktis dan intelektual atau keterampilan, memungkinkan seseorang atau sebuah komunitas untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Hal ini mengacu kepada manajemen orang (kepemimpinan), teknik atau prosedur, pelatihan (melek huruf) serta pengembangan pemikiran dan akal sebagai kemampuan analisis kritis. keterampilan menyoroti pentingnya menerapkan pengetahuan atau kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan seseorang menjadi tindakan atau sumber daya. Indikator tujuan "pengetahuan" level memantau peningkatan pengetahuan: lebih besar kemampuan untuk menganalisa, mengkritik baik diri sendiri dan orang lain, meningkatkan kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dan konflik, mengetahui cara membaca dan menulis, tahu bagaimana mengelola kegiatan ekonomi, yang lebih baik pemahaman tantangan masyarakat, mengetahui bagaimana untuk membandingkan dan mengevaluasi layanan atau kemitraan, dll Kualitas pengetahuan dan kondisi penegakan hukum juga harus diperhitungkan.
- c. ***Will*** (*internal power*). Hal ini mengacu pada kekuasaan dalam, kekuatan psikologis atau kekuatan spiritual: satu nilai-nilai dan ketakutan, kepercayaan diri dan persepsi diri. Ini adalah kemampuan dan kemauan untuk membuat pilihan sendiri untuk masa depan, kesadaran seseorang rencana hidup sendiri serta tantangan yang dihadapi masyarakat seseorang. Konsep "*will*" juga mencakup dua unsur keadaan pikiran dan kemampuan untuk menggunakannya terhadap orang lain (mengetahui bagaimana menjadi). Indikator di tingkat "*will*" akan berfungsi untuk memonitor kemampuan masyarakat meningkat untuk memilih jalan apa yang mereka ingin mengambil dalam hidup bersama-sama dengan peningkatan kepercayaan diri, persepsi diri atau kemampuan untuk mengelola ketakutan. Pada tingkat individu, juga kemampuan untuk menggunakan nilai mereka untuk melihat masa depan.

Pada tingkat masyarakat, itu adalah pertanyaan untuk memperkuat rasa milik kelompok dalam hal komitmen atau menghormati prosedur sehubungan dengan proyek masyarakat bersama.

- d. **Capacity** (*internal power and power with*). Ini berarti memiliki kesempatan untuk membuat keputusan, mengambil tanggung jawab, bebas untuk bertindak sesuka hati dan menggunakan sumber daya seseorang (aset, pengetahuan, akan). Pengambilan keputusan mencakup beberapa aspek : (1) Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, kemampuan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan dan kontrol orang-orang yang membuat keputusan atas nama seseorang, dan (2) Kemampuan untuk membuat keputusan bagi orang lain, dan untuk menunjukkan otoritas (dalam situasi di mana seseorang harus membuat keputusan akhir).

Indikator di tingkat “kemampuan” akan memonitor peningkatan kemampuan untuk membentuk kelompok dan mengatur kelompok, serta kemampuan mereka untuk lobi dan negosiasi dan mempengaruhi institusi (Negara, lembaga keuangan, institusi keagamaan, LSM, dan lain-lain). Derajat, yang mengontrol atau mengambil bagian dalam masyarakat, dari keberadaan sederhana untuk keterlibatan sejati dalam pengambilan keputusan, adalah titik untuk dipertimbangkan.

D. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Penyuluhan Pertanian

Terminologi penyuluhan (*extension*), pertama kali dikenal pada pertengahan abad 19 oleh universitas Oxford dan Cambridge pada sekitar tahun 1850 (Swanson, 1997). Dalam perjalanannya van den Ban (1985) mencatat beberapa istilah seperti di Belanda disebut *voorlichting* yang berarti obor yang berfungsi untuk menerangi, di Jerman lebih dikenal sebagai “*advisory work*” (beratung), *vulgarization* (Perancis), dan *capacitacion* (Spanyol). Roling (1988)

mengemukakan bahwa Freire (1973) pernah melakukan protes terhadap kegiatan penyuluhan yang lebih bersifat top-down. Karena itu, dia kemudian menawarkan beragam istilah pengganti *extension* seperti: *animation*, *mobilization*, *conscientisation*. Di Malaysia, digunakan istilah perluasan sebagai terjemahan dari *extension*, dan di Indonesia menggunakan istilah penyuluhan sebagai terjemahan dari *voorlichting* (Adjid, 2001, hlm. 67).

Diskusi tentang penggunaan istilah “penyuluhan” di Indonesia akhir-akhir ini semakin banyak diperbincangkan. Pemicunya adalah, karena penggunaan istilah penyuluhan dirasa semakin kurang diminati atau kurang dihargai oleh masyarakat. Hal ini, disebabkan karena penggunaan istilah penyuluhan yang kurang tepat terutama oleh banyak kalangan yang sebenarnya “tidak memahami” esensi makna yang terkandung dalam istilah penyuluhan itu sendiri. Di lain pihak, seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi, peran penyuluhan semakin menurun dibanding sebelum dasawarsa delapan-puluhan. Pada awal 1996 mulai melontarkan pentingnya istilah pengganti penyuluhan, dan untuk itu dia menawarkan penggunaan istilah transfer teknologi sebagaimana yang digunakan oleh Lionberger dan Gwin (1982). Pada tahun 1988 Mardikanto (1998), menawarkan penggunaan istilah *edukasi*, yang merupakan akronim dari fungsi-fungsi penyuluhan yang meliputi: edukasi, diseminasi inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi. Meskipun tidak ada keinginan untuk mengganti istilah penyuluhan, Margono Slamet (2000) pada kesempatan seminar penyuluhan pembangunan menekankan esensi penyuluhan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah lazim digunakan oleh banyak pihak sejak Program Pengentasan Kemiskinan pada dasawarsa 1990-an.

Terkait dengan hal tersebut, dalam perjalanannya, kegiatan penyuluhan diartikan dengan berbagai pemahaman, seperti: (a) Penyebar-luasan (informasi), (b) Penerangan/penjelasan, (c) Pendidikan non-formal (luar-sekolah),

(c) Perubahan perilaku, (d) Rekayasa social, (e) Pemasaran inovasi (teknis dan sosial), f) Perubahan sosial (perilaku individu, nilai-nilai, hubungan antar individu, kelembagaan, dll), (g) Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), dan (h) Penguatan komunitas (*community strengthening*)

Dari beberapa kepustakaan dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian diartikan sebagai pendidikan luar sekolah yang ditujukan kepada petani dan keluarganya agar dapat bertani lebih baik, berusaha tani yang lebih menguntungkan, demi terwujudnya kehidupan yang lebih sejahtera bagi keluarga dan masyarakatnya (Wiriatmadja, 1976; Totok Mardikanto dan Sri Sutarni, 1981; Mardikanto, 1993).

Pemahaman tersebut tidak seluruhnya salah, tetapi seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan kehidupan masyarakat global dan tuntutan pembangunan pertanian, baik yang menyangkut kontek dan kontennya, oleh Saragih (2002) dinilai penting untuk melakukan “redefinisi” yang menyangkut pengertian “penyuluhan pertanian” Perubahan-perubahan tersebut telah melanda semua “stakeholder” pembangunan pertanian, yang membawa konsekuensi-konsekuensi terhadap perubahan perilaku masing-masing.

Meskipun demikian, dalam UU No. 16 Tahun 2006, rumusan tentang pengertian penyuluhan pertanian adalah: Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terhadap berbagai pengertian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi, yaitu :

- a. Penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan/pengembangan masyarakat dalam arti luas.
- b. Dalam praktek, pendidikan selalu dikonotasikan sebagai kegiatan pengajaran yang bersifat “menggurui” yang membedakan status antara guru/pendidik yang selalu “lebih pintar” dengan murid/ peserta didik yang harus menerima apa saja yang diajarkan oleh guru/pendidiknya.
- c. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) agribisnis tidak terbatas hanya petani dan keluarganya.
- d. Penyuluhan pertanian bukanlah kegiatan karitatif (bantuan cuma-cuma atas dasar belas-kasihan) yang menciptakan ketergantungan.
- e. Pembangunan pertanian harus selalu dapat memperbaiki produktivitas, pendapatan dan kehidupan petani secara berkelanjutan.

Telaahan beragam pengertian yang terkandung dalam istilah “penyuluhan” sebagaimana dikemukakan di atas, memberikan pemahaman bahwa penyuluhan dapat diartikan sebagai: proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

2. Falsafah Penyuluhan Pertanian

Dalam khasanah kepustakaan penyuluhan pertanian, banyak kita jumpai beragam falsafah penyuluhan pertanian. Ensminger (1962) mencatat adanya 11 (sebelas) rumusan tentang falsafah penyuluhan. Di Amerika Serikat juga telah lama dikembangkan falsafah 3-T: *Teach, True, and Trust* (pendidikan, kebenaran dan kepercayaan/keyakinan). Artinya, penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini.

Dengan kata lain, dalam penyuluhan pertanian, petani dididik untuk menerapkan setiap informasi (baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya. Rumusan lain yang lebih tua dan nampaknya paling banyak dikemukakan oleh banyak pihak dalam banyak kesempatan adalah, yang dikutip Kelsey dan Hearne (1955, hlm. 99) yang menyatakan bahwa falsafah penyuluhan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Karena itu, ia mengemukakan bahwa: falsafah penyuluhan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*). Supadi (2006, hlm. 45) memberikan catatan bahwa dalam budaya feodalistik, pihak yang membantu selalu ditempatkan pada kedudukan yang "lebih tinggi" dibanding yang dibantu.

Pemahaman seperti itu, sangat kontradiktif dengan teori pendidikan kritis untuk pembebasan. Oleh karena itu, pemahaman konsep "membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri" harus dipahami secara demokratis yang menempatkan kedua-belah pihak dalam kedudukan yang setara. Dari pemahaman seperti itu, terkandung pengertian bahwa: (1) Penyuluh harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat (Adicondro, 1990, hlm. 34). Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat, (2) Penyuluhan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk ber-swakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggara-nya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sarannya, (3) Penyuluhan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan

peningkatan harkatnya sebagai manusia. Berkaitan dengan falsafah “*helping people to help themselves*” Ellerman (2001) mencatat adanya 8 (delapan) peneliti yang menelusuri teori pemberian bantuan, yaitu:

- a. Hubungan Penasehat dan Aparat Birokrasi Pemerintah (Albert Hirschman), melalui proses pembelajaran tentang: ide-ide baru, analisis keadaan dan masalahnya yang diikuti dengan tawaran solusi dan minimalisasi konfrontasi/ketegangan yang terjadi: antara aparat pemerintah dan masyarakat, antar sesama aparat, dan antar kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dan yang menikmati keuntungan dari kebijakan pemerintah.
- b. Hubungan Guru dan Murid (John Dewey), dengan memberikan:
 - 1) kesempatan untuk mengenali pengalamannya,
 - 2) stimulus untuk berpikir dan menemukan masalahnya sendiri,
 - 3) memberikan kesempatan untuk melakukan “penelitian”
 - 4) tawaran solusi untuk dipelajari
 - 5) kesempatan untuk menguji idenya dengan aplikasi langsung
- c. Hubungan Manajer dan Karyawan (Douglas McGregor), melalui pemberian tanggungjawab sebagai alat kontrol diri (*self control*)
- d. Hubungan Dokter dan Pasien (Carl Rogers), melalui pemberian saran yang konstruktif dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan atau diusahakannya sendiri. Uji-coba kegiatan melalui pemberian dana dan manajemen dari luar, ternyata tidak akan memberikan hasil yang lebih baik.
- e. Hubungan Guru Spiritual dan Murid (Soren Kierkegaard), melalui pemahaman bahwa masalah atau kesalahan hanya dapat diketahui oleh yang mengalaminya (diri sendiri). Guru tidak boleh menonjolkan kelebihannya, tetapi harus merendahkan diri, siap melayani, dan menyediakan waktu dengan sabar.

- f. Hubungan Organisator dan Masyarakat (Saul Alinsky), melalui upaya demokratisasi, menumbuh-kembangkan partisipasi, dan mengembangkan keyakinan (rasa percaya diri) untuk memecahkan masalahnya sendiri.
- g. Hubungan Pendidik dan Masyarakat (Paulo Freire), melalui proses penyadaran dan memberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut dirinya sendiri.
- h. Hubungan Agen pembangunan dan Lembaga Lokal (E.F. Schumacher), melalui program bantuan untuk mencermati apa yang dilakukan seseorang (masyarakat) dan membantu agar mereka dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Pemahaman tentang penyuluhan sebagai proses pendidikan, di Indonesia dikenal adanya falsafah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi: (1) Ing ngarso sung tulodo, mampu memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat sasarnya, (2) Ing madyo mangun karso, mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreativitas, serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba, dan (3) Tut wuri handayani, mau menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakat petaninya, sepanjang tidak menyimpang /meninggalkan acuan yang ada, demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan hidupnya.

Pemahaman penyuluhan merupakan salah satu system pendidikan, Mudjiyo (1989) mengingatkan untuk mengaitkan falsafah penyuluhan dengan pendidikan yang memiliki falsafah: idealisme, realisme dan pragmatisme, yang berarti bahwa penyuluhan pertanian harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berfikir kreatif dan dinamis. Di samping itu, penyuluhan pertanian harus selalu mengacu kepada kenyataan-kenyataan yang ada dan dapat ditemui di lapangan atau harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Meskipun demikian, penyuluhan harus melakukan hal-hal terbaik yang dapat dilakukan, dan bukannya mengajar kondisi terbaik yang sulit

direalisasikan, karena penyuluhan pada dasarnya harus merupakan bagian integral dan sekaligus sarana pelancar atau bahkan penentu kegiatan pembangunan, Slamet (1989) menekankan perlunya; (1) perubahan administrasi penyuluhan dari yang bersifat “regulatif sentralistis” menjadi “fasilitatif partisipatif”, dan (2) pentingnya kemauan penyuluh untuk memahami budaya lokal yang seringkali juga mewarnai “*local agricultural practices*”. Pemahaman seperti itu, mengandung pengertian bahwa: Administrasi penyuluhan tidak selalu dibatasi oleh peraturan-peraturan dari “pusat” yang kaku, karena hal ini seringkali menjadikan petani tidak memperoleh keleluasaan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Administrasi yang terlalu “*sentralistis*” seringkali tidak mampu secara cepat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul di daerah-daerah, karena masih menunggu petunjuk atau restu dari pusat. Di pihak lain, dalam setiap permasalahan yang dihadapi, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani seringkali berdasarkan pertimbangan bagaimana untuk dapat “menyelamatkan keluarganya”. Dalam kasus seperti itu, seharusnya (1) penyuluh diberi kewenangan untuk secepatnya pula mengambil inisiatifnya sendiri. Karena itu, administrasi yang terlalu “regulatif” seringkali sangat membatasi kemerdekaan petani untuk mengambil keputusan bagi usaha taninya, (2) Penyuluh, selain memberikan “ilmu”nya kepada petani, ia harus mau belajar tentang “ngelmu”nya petani yang seringkali dianggap tidak rasional (karena yang oleh penyuluh dianggap rasional adalah yang sudah menjadi petunjuk pusat). Padahal, praktek-praktek usaha tani yang berkembang dari budaya lokal seringkali juga sangat rasional, karena telah mengalami proses “*trial and error*” dan teruji oleh waktu.

3. Prinsip-Prinsip Penyuluhan Pertanian

Leagans (1961, hlm. 45) menilai bahwa untuk melaksanakan kegiatan atau tugas dan hasil yang baik, penyuluh harus berpedoman pada prinsip-prinsip penyuluhan. Prinsip-prinsip penyuluhan yang dimaksud adalah :

- a. Mengerjakan, artinya, kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan ketrampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. Akibat, artinya, kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Sebab, perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ penyuluhan dimasa masa mendatang.
- c. Asosiasi, artinya, setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan / peristiwa yang lainnya, misalnya, dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada penyuluhan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman yang kerdil/subur, akan mengingatkannya kepada usaha-usaha pemupukan, dan lain lain.

Dahama dan Bhatnagar (1980, hlm. 48) mengungkapkan prinsip-prinsip penyuluhan yang lain, yang mencakup :

- a. Minat dan Kebutuhan, artinya, penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam: apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi sesuai dengan tersedianya sumberdaya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.

- b. Organisasi masyarakat bawah, artinya penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.
- c. Keragaman budaya, artinya, penyuluhan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan penyuluhan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Di lain pihak, perencanaan penyuluhan yang seragam untuk setiap wilayah seringkali akan menemui hambatan yang bersumber pada keragaman budayanya.
- d. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, setiap penyuluh perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal.
- e. Kerjasama dan partisipasi, artinya penyuluhan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang.
- f. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam penyuluhan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi di sini, bukan terbatas pada tawar menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda penyuluhan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sarannya.
- g. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan penyuluhan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, penyuluhan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pangalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata. Penggunaan metoda yang sesuai, artinya penyuluhan harus dilakukan dengan

penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai social budaya) sasarannya. Dengan kata lain, tidak satupun metoda yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran dengan efektif dan efisien.

- h. Kepemimpinan, artinya, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/ kepuasannya sendiri dan harus mampu mengembangkan mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal untuk membantu kegiatan penyuluhan.
- i. Spesialis yang terlatih, artinya, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan khusus akan lebih efektif dibanding yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan (meskipun masih berkaitan dengan kegiatan pertanian).
- j. Segenap keluarga, artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini, terkandung pengertian :
 - 1) Penyuluhan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga,
 - 2) Setiap anggota keluarga memiliki peran/pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan,
 - 3) Penyuluhan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama
 - 4) Penyuluhan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga
 - 5) Penyuluhan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha tani,
 - 6) Penyuluhan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda,
 - 7) Penyuluhan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga, memperkuat kesatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya
 - 8) Mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya.

- k. Kepuasan, artinya, penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program penyuluhan selanjutnya.

Pergeseran kebijakan pembangunan pertanian dari peningkatan produktivitas usaha tani ke arah pengembangan agribisnis, dan perubahan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, telah muncul pemikiran tentang prinsip-prinsip penyuluhan (Soedijanto, 2001, hlm. 23) antara lain:

- a. Kesukarelaan, artinya, keterlibatan seseorang dalam kegiatan penyuluhan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
- b. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain.
- c. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.
- d. Partisipatif, yaitu keterlibatan semua stakeholders sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.
- e. Egaliter, yang menempatkan semua stakeholder dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.
- f. Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama stakeholders.
- g. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.

- h. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.
- i. Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

4. Penyuluhan Sebagai Upaya Pemberdayaan

Ban (1999) menyatakan bahwa penyuluhan merupakan sebuah intervensi sosial yang melibatkan penggunaan komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik. Slamet (2000, hlm. 44) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.

Slamet (2000, hlm. 45) menekankan esensi penyuluhan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah mulai lazim digunakan oleh banyak pihak sejak Program Pengentasan Kemiskinan pada awal dasawarsa 1990-an. Penyuluhan pembangunan sebagai proses pemberdayaan masyarakat, memiliki tujuan utama yang tidak terbatas pada terciptanya “*better-farming, better business, dan better living*”, tetapi untuk memfasilitasi masyarakat (sasaran) untuk mengadopsi strategi produksi dan pemasaran agar mempercepat terjadinya perubahan-perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi sehingga mereka dapat (dalam jangka panjang) meningkatkan taraf hidup pribadi dan masyarakatnya (SDC, 1995 *dalam* Mardikanto 2003, hlm. 43).

Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan tidak sekadar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang

lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mardikanto, 1987, hlm. 65).

Anwar (2000, hlm. 56) menjelaskan fungsi-fungsi penyuluhan yang perlu diarahkan untuk:

- a. Pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk peningkatan mutu sumberdaya manusia.
- b. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam beragam aspek pembangunan
- c. Bersama-sama institusi dan pakar-pakar terkait mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Pada masa pembangunan seperti sekarang ini, pandangan, perhatian dan kepedulian terhadap petani di pedesaan sudah semestinya diperhatikan. Kenyataannya kehidupan para petani di pedesaan tingkat kesejahteraannya masih rendah. Mereka buta akan pendidikan, teknologi, sehingga produksi yang mereka lakukan kurang maksimal. Petani di desa sangat menginginkan perubahan. Para petani di desa tidak dapat melakukan perubahan karena terbentur pada keadaan mereka sendiri, mereka kurang menguasai ilmu-ilmu yang dapat memajukan hasil tani mereka. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Entang Sastraatmadja, (1993, hlm. 6), bahwa melalui kegiatan penyuluhan pertanian maka diharapkan dapat menghilangkan kelaparan dan kemiskinan di Indonesia.

Pada masa pembangunan seperti sekarang ini, pemerintah sangat memperhatikan pendidikan bagi mereka. Pendidikan yang cocok bagi mereka adalah pendidikan non formal yang praktis, mudah diterapkan dalam usaha-usaha produksi produk pertanian. Untuk menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan masyarakat akan kemampuan mereka yang selama ini kurang berdaya diperlukan adanya seorang pekerja masyarakat (penyuluh).

Peranan penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:
(1) menyadarkan masyarakat atas peluang yang ada untuk merencanakan hingga

menikmati hasil pembangunan, (2) memberikan kemampuan masyarakat untuk menentukan program pembangunan, (3) memberi kemampuan masyarakat dalam mengontrol masa depannya sendiri, dan (4) memberi kemampuan dalam menguasai lingkungan sosialnya.

Menurut Tonny (2003, hlm. 27), peran penyuluh sebagai seorang pekerja pengembangan masyarakat dapat dikategorikan ke dalam empat peran, yaitu : (1) peran fasilitator (*Facilitative Roles*), 2) peran pendidik (*Educational Roles*), 3) peran utusan atau wakil (*Representational Roles*), 4) peran teknikal (*Technical Roles*). Peranan fasilitator yang dilakukan oleh pekerja pengembangan masyarakat antara lain sebagai orang yang mampu membantu masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi dalam kegiatan bertani, orang yang mampu mendengar dan memahami aspirasi masyarakat, mampu memberikan dukungan, mampu memberikan fasilitas kepada masyarakat.

Seorang penyuluh juga harus mampu dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat tani. Memberikan proses belajar yang terus menerus agar menumbuhkan kesadaran. Penyuluh juga memberikan informasi, dan memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi lain adalah untuk mengembangkan masyarakat, penyuluhan berperan sebagai utusan atau wakil yang berkaitan dengan interaksi pekerja pengembangan masyarakat melalui penggunaan media, hubungan masyarakat, jaringan antara pekerja pengembangan masyarakat dan pekerja yang relevan, dan berbagi pengalaman dan pengetahuan baik secara formal maupun informal antara pekerja pengembangan masyarakat dan antara masyarakat.

Fungsi penyuluhan lainnya adalah menjembatani kesenjangan antara praktek yang biasa dijalankan oleh para petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang menjadi kebutuhan para petani tersebut. Fungsi penyuluhan dapat dianggap sebagai penyampai dan penyesuaian program nasional dan regional agar dapat diikuti dan dilaksanakan oleh petani, sehingga

program-program masyarakat petani yang disusun dengan itikad baik akan berhasil dan mendapat partisipasi masyarakat

Fungsi penyuluhan yang terakhir adalah fungsi pemberian pendidikan dan bimbingan yang berkelanjutan, yang artinya penyuluhan tidak akan berhenti begitu saja ketika mengetahui bahwa petani di berikan pendidikan, tetapi harus sampai pada sikap/prilaku yang lebih baik (perubahan). Namun, penyuluh tetap membantu mereka ke arah yang lebih baik lagi.

E. Konsep Kemandirian dan Pengembangan Diri

1. Pengertian dan Karakteristik Kemandirian

Menurut Adiwikarta dalam Iskandar (1993, hlm. 18), kemandirian adalah sebagai ciri orang dewasa. Kedewasaan di sini dititikberatkan pada kemampuannya di dalam melaksanakan peranan produktivitasnya sehingga mampu bertanggung jawab dalam hidupnya. Selanjutnya Syaodih (1993) mengemukakan bahwa: Manusia mandiri adalah manusia yang memiliki keunggulan dalam kemampuan, berkepribadian sehat dan bermoral kuat. Manusia unggul adalah manusia yang memiliki kemampuan tertentu, yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam karir atau pekerjaan. Keunggulan tidak berarti harus unggul dalam segala hal, dan mengungguli semua orang, tetapi unggul (*excellent*) dalam satu bidang tertentu dan tingkat tertentu. Keahlian atau kemampuan professional juga didukung oleh penguasaan pengetahuan dalam sesuatu bidang, tetapi dalam kadar yang lebih luas dan mendalam. Penguasaan pengetahuan tidak berhenti pada tahap tahu atau *memory (remembering)*, tetapi berlanjut dengan tahap berpikir atau *thinking (problem solving, reasoning, conceptual thinking)*. (Nana Syaodih

S, 1993, hlm. 4-5). Selanjutnya Brookfield (1993), Butkin (1979) dan Iskandar (1993) mengemukakan bahwa kemandirian dapat didefinisikan sebagai kekuatan seseorang didalam memahami dan menyadari alternatif-alternatif pilihan bagi dirinya.

Kemandirian bisa terjadi pada perseorangan dimana kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri dan sejauh mungkin percaya pada diri sendiri serta bebas dari ketergantungan dari orang lain. Idealnya makin bertambah matang usia seseorang makin berkurang sikap dan perilaku ketergantungannya kepada orang lain, sehingga tingkah lakunya mengarah kepada saling membutuhkan dan saling bergantung antara seseorang dengan yang lainnya. Pada akhirnya orang itu akan mampu hidup mandiri. Akan tetapi, manusia mandiri (dalam kehidupan mandiri) akan terdapat saling membutuhkan dan saling ketergantungan antara dirinya dengan orang lain. Hal ini disebabkan, aktualisasi diri berasal dari dirinya sendiri dan terwujud melalui pemanfaatan potensi-potensi diri dan lingkungannya. Selain itu, tugas-tugas kehidupan dan peranan-peranan sosial selalu bersifat situasional, interaksional atau rasional, serta *behavioral* (menyangkut perilaku). Suatu tugas, merupakan suatu pekerjaan yang berhubungan dan berada di dalam suatu situasi, atau tugas merupakan suatu kesatuan kerja dan kesatuan tindakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan peranan, merupakan pola tugas dan tingkah laku yang diharapkan yang berhubungan dengan status sosial tertentu, yang diekspresikan menurut pengertian dan batasan-batasan tertentu, serta berhubungan dengan penampilan tingkah laku dan relasi-relasi dengan orang-orang lain. Situasi sosial merupakan kesatuan dasar bagi terjadinya intervensi sosial dan terdiri dari kombinasi antara orang dengan tempat (*setting*). Situasi sosial memberikan konteks bagi transaksi-transaksi peranan yang terfokus serta kemandirian individu-individu maupun sistem sosialnya. Dengan demikian kemandirian menunjukkan keseimbangan, saling pertukaran atau pertemuan, saling memperkuat, dan adaptasi timbal balik

antara orang dengan orang secara individual maupun orang-orang secara kolektif dengan lingkungannya.

Nana Syaodih (1993) mengemukakan, bahwa: Manusia ibarat roda gigi (*wheel*), yang memiliki tonjolan (kelebihan) dan lekukan (kekurangan). Berkat tonjolan dan lekukan tersebut manusia bisa bekerja sama secara harmonis, saling menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Kerjasama yang harmonis tersebut akan membawa kesejahteraan dan kemajuan, tetapi pemandulan diri (orientasi ke luar) atau eksploitasi (orientasi ke dalam) baik yang nyata atau terselubung akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. (Nana Syaodih, 1993, hlm. 8)

Dalam konteks pembangunan masyarakat, Kamil (2002, hlm. 93) menjelaskan pengertian kemandirian adalah:

The participation of the people them selves in efforts to improve their level of living with as much relieve as possible on their own initiative, and the provision of technical and other services in way witch encourage initiative, self help and mutual help and make these more effective. (Kamil, 2002, hlm. 93)

Mengacu pada batasan tersebut lebih lanjut Kamil (2002, hlm. 93) mengemukakan, bahwa: Kemandirian memiliki nilai lain yang tidak hanya sekedar menjiwai konsep wiraswasta yang lebih mengarah pada nilai-nilai ekonomi (benefit), namun pada definisi tersebut terkandung pula nilai-nilai sosial & nilai-nilai budaya dengan kandungan utamanya selain mampu menolong dirinya sendiri akan tetapi mampu menolong orang lain dalam bentuk gotong royong dan partisipasi. Sehubungan dengan itu, konsep kemandirian yang menjiwai nilai-nilai wiraswasta sebenarnya hanya sebagian kecil saja, karena secara lebih luas kemandirian tidak hanya untuk itu akan tetapi berlaku bagi gerak langkah kehidupan manusia. (Kamil, 2002, hlm. 93)

Maka kemandirian merupakan aktualisasi diri yang bertumpu pada karakteristik:

- a) Dapat memberikan keputusan yang terbaik untuk diri sendiri, dan Orang banyak/kelompok.
- b) Mampu memenuhi kebutuhan (Jasmani-Rohani, Sosial-budaya, dan Keamanan-kepastian).
- c) Bisa menerima/menghargai pada orang/kelompok lain.
- d) Memiliki ketergantungan yang sangat minimal kepada pihak lain

Sejalan dengan uraian di atas, kemandirian merupakan perwujudan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dirinya sendiri dalam menemukan kebutuhan hidupnya, yang bercirikan oleh kemampuan dan kebebasan menentukan pilihan yang terbaik (Hubeis, 2002, hlm. 9). Memakai konsep yang relatif berbeda, Raharjo (2002, hlm. 17) mengartikan kemandirian sebagai upaya seseorang yang didasarkan pada kepercayaan kemempuan diri dan pada sumberdaya yang dimiliki sebagai semangat swadaya. Dijelaskan bahwa faktor-faktor yang membentuk kemampuan swadaya adalah; (1) keuletan, (2) kerja keras, dan (3) jiwa wiraswasta. Selanjutnya Adjid (1992, hlm. 46) bahwa kemandirian lebih menekankan pada kepercayaan diri dalam pengambila keputusan secara bebas dan bijaksana.

Lebih khusus Margono Slamet (2005, hlm. 27) menegaskan bahwa untuk menumbuhkan dan membina kemandiriannya, petani perlu diarahkan agar dengan kekuatan dan kemampuannya berupaya untuk belajar dan bekerjasama untuk mencapai segala yang dibutuhkan dan diinginkannya.

Program pendidikan luar sekolah dalam mengembangkan sikap dan perilaku kemandirian, berperan membantu untuk menyadarkan dan mengakui potensi dan kemampuan dirinya. Masyarakat dibantu untuk mampu berdialog dengan dirinya dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Program-program pendidikan luar sekolah diarahkan untuk memotivasi warga belajar dalam upaya

mengaktualisasikan potensi diri, berfikir dan berbuat positif terhadap lingkungan, serta mencapai diri dan bermakna bagi lingkungannya.

Suryana (2009, hlm. 57) mengemukakan bahwa “kemandirian merupakan paradigma sosial, dengan 3 (tiga) karakteristik, yaitu mandiri secara fisik (dapat bekerja sendiri dengan baik), mandiri secara mental (dapat berfikir secara kreatif dan analitis dan menyusun serta mengekspresikan gagasan), mandiri secara emosional (nilai yang ada dalam diri sendiri)”.

Sikap mandiri yang dimunculkan sebagai *outcome*/dampak dan keikutsertaan dalam pendidikan nonformal diharapkan tidak hanya berdampak pada faktor psikologis individu saja tetapi akan memunculkan dampak sosial yang tinggi untuk melakukan kewajiban dan memanfaatkan segala potensi yang ada pada diri dan lingkungannya. Kemandirian merupakan kemampuan orang untuk mengoptimalkan diri dalam kebersamaan (bekerjasama) dengan orang lain. Ini berarti bahwa; pertama, kemandirian itu harus diawali dengan kegiatan belajar dan mengikuti fase-fase perkembangan sehingga dapat dimanfaatkan potensi diri untuk memecahkan masalah. Belajar dan bekerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan, artinya orang dewasa belajar, dan apa yang dipelajarinya itu akan menarik bilamana erat dengan lapangan kehidupan atau pekerjaan. Kedua, kemandirian tidak berarti anti terhadap kerjasama atau menolak saling keterkaitan dan saling ketergantungan, Margono (2005, hlm. 43) menegaskan bahwa kemandirian justru menekankan perlunya kerjasama yang disertai tumbuh dan berkembangnya; (1) aspirasi, (2) kreativitas, (3) keberanian mengambil resiko, dan (4) prakarsa seseorang bertindak atas dasar kekuatan sendiri dalam kebersamaan (*collective self reliance*). Lebih lanjut Prabowo Tjitropranoto (2008, hlm. 27) menuturkan bahwa seseorang yang memiliki kemandirian mengindikasikan (1) memiliki pandangan dan wawasan kedepan, (2) memiliki jiwa wirausaha, (3) suka bekerja keras dan ulet dalam menjalankan tugas/pekerjaannya, (4) memiliki jiwa terbuka untuk melakukan kerjasama

dengan pihak lain, (5) tanggungjawab, (6) menghargai waktu, serta (7) memiliki harga diri. Lebih lanjut Rifaid (2000) menjelaskan bahwa Kemandirian menyangkut seluruh aspek kehidupan yang dapat diamati secara fisik, mental, sosial dan segi lain yang tumbuh dan berkembang secara bertahap. (Setiawati, 2005, hlm. 44). Adapun ciri kemandirian adalah sebagai berikut:

- a. *Memiliki Rasa Tanggungjawa, maksudnya* adalah ada atau timbulnya rasa dan kemauan, serta kemampuan individu untuk melakukan kewajiban dan memanfaatkan hak hidupnya secara sah dan wajar. Karena itu tanggungjawab tersebut berkaitan aturan-aturan atau norma-norma hidup yang berlaku dan dipegang teguh oleh suatu kelompok masyarakat.
- b. *Tidak Bergantung Pada Orang lain, maksudnya;* Individu yang memiliki sikap mandiri sudah pasti tidak akan memanfaatkan hak orang lain untuk dijadikan hak dirinya/saudaranya dan tidak akan hidup di tengah-tengah hak orang lain. Berdasarkan ciri kedua ini dapat dikatakan bahwa individu yang mandiri tidak akan merepotkan orang lain baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, maupun dalam bidang pemenuhan hidup yang lainnya. Untuk itu individu yang mandiri menganggap bahwa bantuan orang lain tidak akan dijadikan sandaran tetapi hanya sekedar pelengkap dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
- c. *Mampu Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal,* dimaksudkan bukan saja kebutuhan ekonomi, akan tetapi mencakup semua kebutuhan baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah, seperti belajar diterima dalam lingkungan sosial, berbuat dan lain sebagainya.
- d. *Memiliki Etos Kerja yang Tinggi* individu dapat dikatakan mandiri bila memiliki kemauan kerja yang baik dan tinggi. Hal ini ditandai oleh adanya keuletan dalam bekerja, semangat kerja yang tinggi, memiliki prinsip keseimbangan kerja antara pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

e. *Disiplin dan Berani Mengambil Resiko*, maksudnya adalah seseorang memiliki sikap yang konsisten dan komitmen dengan pekerjaan, sepanjang pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi diri pribadinya maupun bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Seseorang yang mandiri juga selalu melaksanakan sesuatu berdasarkan keyakinan dirinya dan bukan karena dorongan pihak lain, serta tidak merasa takut akan kegagalan dari usahanya.

Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan potensi dirinya berupaya bekerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dicirikan oleh (1) sadar terhadap masalah yang dihadapinya, dan mempunyai dorongan untuk mengatasinya, (2) memiliki aspirasi, (3) berfikir rasional, (4) berjiwa dan bertindak inovatif, (5) penuh inisiatif untuk bertindak/kreatif, (6) memiliki wawasan ke depan, (7) partisipatif, maksudnya dengan sumberdaya yang dimilikinya dan kemampuannya bekerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, (8) memiliki jiwa wirausaha dan dorongan kuat untuk berprestasi, (9) ulet. maksudnya tidak mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan, dan (10) memiliki harga diri.

2. Kemandirian dan Pengembangan Diri

Pengembangan diri mengandung makna sebagai kekuatan yang memberi arah kepada individu dalam hidupnya yang bertanggungjawab penuh terhadap konsekuensi atas pilihan dan perilakunya. Semakin mampu individu mengarahkan perilakunya, semakin mungkin untuk dapat menjalani hidupnya secara efektif dan terhindar dari situasi yang mengganggu dalam mencapai tujuan dan sasaran hidupnya.

Individu yang pengembangan dirinya tidak tertata dengan baik, akan termanifestasikan dalam berbagai kemungkinan, seperti kurang percaya diri,

kurang mampu mengendalikan diri, tidak percaya terhadap : kecakapan yang dimilikinya, persepsi, motif, dan timbangan dirinya.

Sebagai suatu proses, pengembangan diri merujuk kepada upaya untuk melakukan perencanaan, perhatian, dan evaluasi terhadap serangkaian aktivitas yang mereka lakukan (Merriam & Caffarella, 1991, hlm. 41). Sedangkan sebagai produk, pengembangan diri lebih merujuk kepada upaya untuk selalu memelihara dan melanjutkan kemampuan dari hasil yang telah dicapai. (Brookfield, 1985, hlm. 18). lebih lanjut Candy (1991) menambahkan bahwa dalam mengeksplorasi pengembangan diri, setidaknya terdapat empat komponen yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut : (1) atribut pribadi (otonomi pribadi), (2) kesadaran dan kapasitas untuk belajar (manajemen diri), (3) pengorganisasian pengajaran pada adegan formal (kontrol diri) dan (4) kemampuan individu untuk belajar di luar adegan formal (otodidak).

Dengan demikian, pengembangan diri dapat dirumuskan sebagai kemampuan dalam menentukan tujuan, merencanakan kegiatan untuk meraih tujuan tersebut, kemandirian dalam mengelola waktu, dan menentukan proses serta hasil pengalaman belajar.

Sedangkan Knowles (2005, hlm. 18) mendefinisikan pengembangan diri sebagai proses individu dalam mengambil inisiatif, tanpa mendapat bantuan dari orang lain, kemampuan menginventarisasi kebutuhan belajar, merencanakan pencapaian tujuan, mengidentifikasi pihak-pihak dan material yang dapat dijadikan sumber untuk mencapai tujuan, memilih dan mengimplementasikan strategi belajar yang sesuai, dan kemampuan mengevaluasi hasil belajar. Broadly mendefinisikan pengembangan diri sebagai upaya peserta didik dalam bertanggung jawab untuk merencanakan, menghasilkan dan mengevaluasi proses dan hasil belajar yang dilakukan (Brocket, 1983, hlm. 16).

Knowles (2005, hlm. 21), lebih lanjut menyampaikan tiga alasan tentang pentingnya pengembangan diri pada warga belajar. Pertama, individu yang banyak mengambil inisiatif dalam belajar atau proaktif akan belajar dengan lebih

efektif dibandingkan dengan warga belajar yang pasif dan banyak menggantungkan pembelajaran pada instruksi fasilitator. Kedua, pengembangan diri merupakan proses alami dalam mengembangkan aspek-aspek psikologis warga belajar, khususnya dalam meningkatkan kemampuan tanggung jawab pribadi dalam kehidupan. Ketiga, sebagai proses pencegahan, pengembangan diri membantu warga belajar mengatasi permasalahan kecemasan, frustrasi, kegagalan dalam belajar dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sumber belajar.

Jones, Valdez, Nowakowski&Rasmussen (1995) dalam Knowles, (2005, hlm. 21) menggambarkan bahwa karakteristik warga belajar yang memiliki kemampuan pengembangan diri adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap belajar, mampu melakukan pengelolaan diri dan memiliki kesiapan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Adapun Covey (1989) mengistilahkan pengembangan diri dengan proaktif, yaitu sebagai salah dimensi karakteristik individu yang sangat efektif.

Menurut Watson dan Tharp (1972, hlm. 38) konsep pengembangan diri (*self direction*) dikembangkan untuk meningkatkan *the quality of personal relationship to world around*. Konsep ini menunjukkan bahwa esensi pengembangan diri adalah peningkatan kualitas hubungan personal dengan lingkungan. Ini artinya, jika individu senantiasa melakukan pengembangan diri, ia akan memiliki kemampuan hubungan personal yang berkualitas dengan lingkungan sekitarnya. Watson dan Tharp dalam Knowles (2003, hlm. 23) menjelaskan bahwa pengembangan diri (*self direction*) merupakan kemampuan, yakni kemampuan untuk mengarahkan diri. Dalam hal ini, yang diarahkan adalah berbagai situasi agar memusat pada munculnya perilaku yang diharapkan. Oleh karena itu Watson dan Tharp mendefinisikan pengembangan diri (*self direction*) sebagai kemampuan mengarahkan berbagai situasi untuk menguatkan munculnya perilaku baru yang positif. Sementara, Hiemstra (1994, hlm. 49), menjelaskan bahwa tanggung jawab, otonomi, dan kemandirian merupakan aspek-aspek determinan dari pengembangan diri.

Agar individu dapat mengarahkan berbagai situasi, ia seyogyanya memiliki (a) tujuan yang jelas, (b) visi belajar yakni kemauan untuk senantiasa mengubah diri ke arah yang lebih maju, (c) dasar-dasar belajar seperti dorongan dan keterampilan untuk mengetahui, memahami, dan melakukan yang terbaik, serta (d) memiliki kontrol diri yang mencakup kesadaran diri, kontrol emosional, dan kontrol perilaku sosial.

Menurut Watson dan Tharp (1972, hlm. 50) sedikitnya ada lima konsep yang terkait dengan pengembangan diri, yakni :

- a. Menempatkan perilaku sebagai fokus analisisnya;
- b. Menerapkan hukum belajar;
- c. Menekankan penguatan (reinforcement) positif;
- d. Jika memungkinkan, program pengembangan diri dirancang untuk terjadinya pengalaman belajar baru pada situasi kehidupan nyata; dan
- e. Sebaiknya seseorang mendesain program pengembangan dirinya sendiri.

Perilaku yang dipilih untuk dimodifikasi melalui pengembangan diri disebut perilaku target (target behavior). Perilaku target mungkin perilaku yang tidak diharapkan yang ingin dieliminasi, mungkin juga perilaku yang diharapkan yang akan ditingkatkan. Misalnya, seseorang terbiasa malas membaca ia melakukan pengembangan diri dengan cara selalu datang ke perpustakaan atau berteman dengan orang yang suka membaca. Malas membaca merupakan perilaku target yang akan dieliminasi melalui pengembangan diri.

Sementara itu, menurut Covey (1997) pengembangan diri memiliki kesamaan arti dengan proaktif yaitu kekuatan yang mendorong dan mengarahkan individu menjadi pribadi yang efektif. Untuk mengkonsepsikan pengembangan diri, Covey (1997, hlm. 61) menyatakan bahwa lebih dari hanya sekedar inisiatif. Pengembangan diri berarti bahwa sebagai manusia, individu bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Individu adalah subyek yang mempunyai inisiatif dan tanggung jawab untuk membuat segala sesuatunya terjadi.

Ungkapan ini menunjukkan bahwa esensi pengembangan diri adalah kemampuan untuk memunculkan dan mewujudkan inisiatif secara bertanggung jawab. Inisiatif dalam konsep pengembangan diri mengimplikasikan bahwa perilaku pengembangan diri merupakan perilaku proaktif, bukan perilaku reaktif. Sebab perilaku reaktif mengandung pengertian bahwa perilaku yang dimunculkan individu sangat bergantung pada stimulus sehingga tindakan individu sepenuhnya akan bergantung kepada lingkungan. Artinya, jika lingkungan memberikan stimulus maka individu akan melakukan tindakan. Tetapi manakala lingkungan tidak memberikan stimulus maka individu tidak akan melakukan sesuatu, alih-alih mengambil tindakan untuk lebih maju. Perilaku reaktif seringkali lebih emosional ketimbang rasional. Akibatnya individu dapat berperilaku di luar alam kesadaran berpikirnya, yang pada gilirannya perilaku mereka seringkali lepas kontrol. Perilaku reaktif umumnya didasari oleh proses dependensi, yakni kebergantungan pada pihak lain, dalam hal ini terutama bergantung kepada *significant person*.

Proaktif berbeda dengan reaktif. Proaktif merupakan perilaku inisiatif yaitu kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk berhasil (Covey, 1997, hlm. 65). Sedikitnya ada lima ciri yang terdapat dalam perilaku inisiatif yang membuat individu mengambil tindakan efektif untuk sukses, yakni: (1) sadar akan pentingnya berinisiatif, (2) mampu berpikir alternatif, (3) mau dan mampu memperbaiki diri, (4) tidak memaksakan kehendak, dan (5) mampu menetapkan tujuan dan berupaya mencapainya.

Aspek kedua dari pengembangan diri adalah tanggung jawab, artinya bahwa individu yang memiliki pengembangan diri bukan sekedar berinisiatif tetapi bertanggung jawab atas inisiatif yang diambilnya. Secara etimologis, tanggung jawab berasal dari *responsibility*, yakni response berarti tindakan atau jawaban dan ability berarti kemampuan. Jadi secara etimologis tanggung jawab berarti kemampuan merespon. Kecenderungannya semakin baik tanggung jawab

individu maka kemampuan meresponnya cenderung semakin tepat. Oleh sebab itu Covey (1997, hlm 61) mendefinisikan tanggung jawab sebagai kemampuan untuk memilih respon yang tepat.

Secara tegas, Covey (1997, hlm. 61) menjelaskan bahwa individu yang bertanggung jawab tidak menyalahkan keadaan atau kondisi pada saat tujuan atas inisiatif tindakannya tidak tercapai. Individu yang bertanggung jawab cenderung lebih memilih untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan tindakannya yang diperlukan bagi perbaikan tindakan berikutnya.

Perilaku orang bertanggung jawab merupakan produk dari pilihan sadar dan berdasarkan nilai. Artinya, pada saat akan melakukan suatu tindakan ia sadar betul bahwa setiap tindakan berisiko dan mengantisipasi akibat dari apa yang dilakukannya. Individu yang sadar dan mengetahui secara tepat resiko dari tindakannya cenderung berupaya mencari resiko yang paling ringan bagi dirinya. Karena memiliki kesadaran dan pengetahuan itulah maka individu yang bertanggung jawab sudah memulai mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perilakunya pada saat atau bahkan lama sebelum perilakunya dimunculkan.

Bukan hanya sebagai produk dari kesadaran atas adanya resiko dari suatu perilaku, tanggung jawab juga didasarkan atas nilai, yakni seperangkat prinsip tentang benar dan salah serta penting dan tidak penting dilakukan (Bertens, 2004, 57). Bagi individu yang bertanggung jawab, jika sesuatu perilaku benar atau penting dilakukan untuk perkembangan dirinya maka ia mencoba untuk melakukannya semaksimal mungkin. Tetapi jika sebaliknya, ia menjauhi tindakan itu agar tidak terperosok pada suatu dilema hidup.

Individu yang bertanggung jawab mampu membuat dan memenuhi komitmen. Misalnya, ia mampu membuat janji pada diri sendiri untuk ditepati. Jika ternyata ditepati dengan respon yang positif maka dapat dikatakan ia telah

mampu membuat komitmen, yakni keajegan diri dalam memegang suatu prinsip, aturan, dan kebenaran.

Proaktif sebagaimana dipaparkan di muka diisyaratkan oleh Covey (1997, hlm. 65) sebagai konsepsi dari pengembangan diri (*self direction*). Proaktif pada hakikatnya merupakan pengembangan diri dengan mengambil suatu upaya aktif untuk meningkatkan diri lebih baik. Salah satu kunci utama pengembangan diri menurut Covey adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas proaktif, individu mestinya mampu menjawab dengan perilakunya sendiri atas pertanyaan “Apa yang penting bagi saya?”

Konsep lain tentang pengembangan diri (*self direction*) muncul dari Maryland *Development Disabilities Council* (2005, hlm. 10). Menurut lembaga ini, pengembangan diri adalah kemampuan individu untuk membuat dan mengimplementasikan rencana hidup (*life planning*). Menurutnya, pengembangan diri mengikuti lima prinsip utama.

- (1) Kebebasan (*freedom*), yakni kemampuan mengambil keputusan dalam membuat rencana hidup oleh dan untuk diri sendiri. Sedikitnya ada lima ciri individu yang memiliki kemampuan ini, yakni ia mampu menjawab dengan respon yang tepat atas pertanyaan berikut ini; (a) Bagaimana dan di mana bekerja, belajar, atau hidup? (b) Apa pilihan hidup yang diinginkan? (c) Bagaimana memberikan sesuatu yang berarti bagi diri dan lingkungan? (d) Layanan atau dorongan macam apa yang digunakan untuk hidup lebih baik? Dan (e) Dengan siapa sebaiknya menghabiskan waktu dalam hidup?
- 2) Otoritas (*authority*), yakni kemampuan mengontrol rencana hidup mencakup hal-hal seperti ; (a) Mampu menentukan rencana hidup, (b) Mampu membuat keputusan, dan (c) Mampu memilih tindakan bagaimana agar sesuatu lebih bermakna.

- 3) Dorongan (*support*), yakni kemampuan untuk mengorganisasikan dorongan psikologis untuk memunculkan kekhasan diri dalam membuat dan mengimplementasikan rencana hidup, seperti; a) Memiliki dorongan untuk memelihara diri sendiri, b) Memiliki dorongan untuk aktif pada lingkungan di mana ia berada, dan (c) Memiliki dorongan untuk menemukan karir (pekerjaan).
- 4) Tanggung jawab (*responsibility*), merasa berkewajiban untuk memanfaatkan kepercayaan orang dan berkontribusi terhadap lingkungan dalam membuat dan mengimplementasikan rencana hidup, meliputi; a) Menentukan sesuatu. b) Mematuhi hukum, c) Membuat pilihan, d) Berpartisipasi dalam lingkungan hidup, d) Berupaya mengembangkan hubungan positif dengan teman, keluarga, dan tetangga.
- 5) Kontrol, yakni kemampuan mengendalikan diri dalam membuat dan mengimplementasikan rencana hidup, misalnya; a) Sadar akan keadaan diri, b) Mampu mengelola diri, dan c) Memiliki komitmen terhadap rencana hidup.

3. Pengembangan Diri dalam Mengembangkan Perilaku Efektif

Kecakapan pengembangan diri pada prinsipnya merupakan fasilitas untuk mengembangkan perilaku efektif. Perilaku efektif dapat memberikan kontrol sebaik mungkin pada individu, yaitu dalam mengontrol diri dari pengaruh lingkungan terhadap dirinya. Indikator perilaku efektif antara lain individu dapat memperhitungkan diri, waktu dan tenaganya dan sanggup memikul resiko-resiko ekonomis, psikologis, dan fisik.

Blocher (1974, hlm. 97) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perilaku efektif adalah “*effective human behavior can be defined as taht behavior giving an*

individual the greatest possible long-term control over his environment and the effective response within him that are evoked by that environment”.

Perilaku efektif merupakan manifestasi dari pribadi efektif. Pribadi efektif adalah pribadi yang sanggup memperhitungkan diri, waktu dan tenaganya serta bersedia memikul resiko-resiko ekonomis, psikologis, dan fisik. Ia memiliki kemampuan untuk mengenal, mendefinisikan dan memecahkan masalah-masalah. Ia konsisten dalam berhadapan dengan berbagai situasi dan dapat menunjukkan peranannya yang khas. Ia mampu berpikir secara berbeda, orisinal, dan kreatif. Ia dapat beraktivitas dan melakukan tindakan yang diharapkan oleh individu maupun lingkungannya sehingga aktivitas dan tindakan tersebut bermakna bagi dirinya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. (Shertzer & Stone, 1980, hlm. 62) Lebih lanjut Blocher (1974, hlm. 97-98) menjabarkan karakteristik perilaku efektif ke dalam lima dimensi, yaitu :

- a. *Consistency*, siswa yang berperilaku efektif, konsisten dalam menjalankan peran-peran sosialnya. Perilaku yang konsisten ini didasari oleh identitas pribadi yang terintegrasi. Selanjutnya pribadi yang terintegrasi ini memberikan arah dan kesatuan perilaku.
- b. *Commitment*, siswa yang berperilaku efektif memiliki tanggung jawab terhadap dirinya dalam mencapai tujuannya. Ia mampu mempertimbangkan diri dan lingkungannya dalam memperjuangkan tercapainya tujuan.
- c. *Control*, siswa yang berperilaku efektif mampu mengontrol dorongan dan respons-respons emosinya. Ia dapat menerima hal-hal yang tidak dapat diubah dan dielaknya dengan respons emosi yang tepat. Secara khusus ia dapat menguasai frustrasi, ambiguitas dan permusuhan.
- d. *Competence*, siswa yang berperilaku efektif dapat menguasai sejumlah perilaku yang diperlukan dalam hidupnya. Ia mampu memecahkan masalah secara efektif. Ia mampu menciptakan hubungan pribadi yang efektif dengan

lingkungannya. Ia dapat menguasai lingkungan dalam batas-batas yang mungkin dapat ia lakukan.

- e. *Creativity*, siswa yang berperilaku efektif dapat berpikir dengan cara yang original dan divergent. Ia tidak mematikan ide-ide dan mendukung hal-hal baru. Ia menghargai perbedaan pendapat, proses berpikirnya tidak kaku dan ia secara mendalam menggunakan perasaannya dengan akurat.

Perilaku efektif ditandai oleh adanya tanggung jawab dalam belajar, mampu mengelola diri dalam belajar, kreatif dalam belajar, mampu berinteraksi dengan teman, mampu berinteraksi dengan anggota keluarga, mampu berinteraksi dengan lingkungannya, dapat mengontrol dorongan-dorongan dan respons-respons emosinya, mampu menerima hal-hal yang tidak dapat diubah dan dielakkan, mampu menguasai frustrasi, ambiguitas, dan permusuhan.

Perilaku efektif mengarah kepada keseimbangan dalam memenuhi tuntutan dari dalam dirinya yang sesuai dengan lingkungannya. Sehubungan dengan ini Blocher (1974, hlm. 61) menyebutkan bahwa :

Effective behavior as the product in interaction of two basic human tendencies. These are the need for hemoestatis, or in other words, a comfortable level of equilibrium between inner needs and outer forces, and the need for differentiation, that is, the need of organism to grow in self-actualizing ways.

Dalam melakukan pengolahan diri untuk mencapai perilaku efektif, DM. Dahlan (2006, hlm. 59) menyarankan ; (a) Pikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, (b) Kerjakan sesuatu dalam koridor taat asas dan taat hukum, (c) Ikuti perkumpulan yang bergerak dalam kebaikan dan perilaku terpuji, (d) Hati-hati dan hindari perkumpulan yang mengembangkan tindakan-tindakan tidak terpuji, (e) Selalu mereferensi norma dan moral, dan (f) Menjaga ucapan dan tindakan dari pengaruh yang kotor.